



Dakwah dan Politik Masa Pergerakan: Kajian Historis Media Islam Era Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1942

Anggit Rizkianto

STID Al-Hadid Surabaya
anggitrizkianto@gmail.com

Abstrak: *Studi terhadap media-media Islam masa pergerakan nasional di Jawa selama ini banyak didominasi oleh kajian historis dengan perspektif gerakan sosial-politik. Tanpa menghilangkan aspek politisnya, studi ini berupaya menajamkan pembacaan sejarah melalui perspektif gerakan dakwah. Kajian yang dilakukan bermaksud menguraikan karakteristik jurnalisme dakwah media Islam selama masa pergerakan, dan membaca hubungannya dengan aspek-aspek lain yang bersifat politik. Metodologi studi ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahap, mulai dari pemilihan topik, heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil studi menunjukkan bahwa media-media Islam pada masa pergerakan bukanlah organ yang independen dan bergerak sendiri, karena mereka selalu terhubung dengan misi dan agenda kelompok dakwah yang menaunginya. Jurnalisme dakwah yang diperjuangkan media-media Islam pada masa itu dapat disebut sebagai jurnalisme profetik atau jurnalisme kenabian dengan semangat pembaharuan Islam di Indonesia. Di sisi lain, gerakan politik mereka bersifat ideologis dengan maksud berkontribusi pada terwujudnya masyarakat-bangsa Indonesia yang berlandaskan Islam. Dengan karakteristik itu, maka dapat dibaca adanya hubungan mutualisme antara dakwah dan politik pada media-media Islam, juga organisasi keislaman di baliknya.*

Kata kunci: *Dakwah, Politik, Jurnalisme Dakwah, Media Islam, Pergerakan Nasional*

Abstract: *Dakwah and Politics In The Movement Time: Historical Study of Islamic Media in the Era of Popular Radicalism in Java 1912-1942* Studies of Islamic media during the national movement in Java have been dominated by historical studies with a socio-political movement perspective. Without eliminating the political aspect, this study attempts to read history with da'wah movement perspective. The study try to describe the characteristics of Islamic da'wah journalism during the movement period, and read its relationship with political aspects. The methodology of this study uses historical research methods which consist of five stages: topic selection, heuristics, source criticism or verification, interpretation, and historiography. The results of the study show that the Islamic media during the movement were not independent institutions, because they were connected to the mission and agenda of the da'wah organizations behind them. The da'wah journalism of the Islamic media at that time is the prophetic journalism, with the spirit of Islamic renewal in Indonesia. On the other side, their political movement has an ideological goal with the intention to contribute to the realization of an Indonesian nation-society based on Islam. With these characteristics, it can be concluded that there is a mutualistic relationship between da'wah and politics in Islamic media, as well as the Islamic organizations behind them.

Key words: *Da'wah, Politic, Da'wah Journalism, Islamic Media, National Movement.*

Pendahuluan

Keberadaan media sangat penting bagi perkembangan dakwah, tak terkecuali di Indonesia. Media—dengan produk-produk jurnalismenya—dapat dibaca lebih dari sekadar lembaga yang memproduksi dan menyebarkan berita, karena dalam dimensi dakwah ia juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman. Berdakwah dengan memanfaatkan produk media (pers) merupakan model komunikasi islami, karena adanya harapan perubahan atau pembentukan sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam dari proses komunikasi yang terjadi.¹

Di era kontemporer ketika masyarakat semakin bergantung pada teknologi, dakwah melalui media semakin menemukan relevansinya. Dakwah semestinya tidak hanya dilakukan di atas mimbar, tetapi juga memasuki kanal-kanal yang mudah diakses publik. Namun, di saat yang sama, maraknya dakwah yang digaungkan media-media Islam pada titik tertentu memicu gerakan dakwah itu berkelindan dengan perkara-perkara politik. Sebagaimana diungkapkan Eickelman dan Anderson (2003), keberadaan media sebagai alat dakwah telah menciptakan ranah publik muslim (*muslim public sphere*). Artinya, media-media Islam turut menciptakan ruang kontestasi terbuka atas otoritas menggunakan bahasa normatif yang secara simbolik mengatasnamakan Islam.²

¹ Suf Kasman, "Jurnalistik Dakwah (Sebuah Model Komunikasi Islami)," *Jurnal Jurnalisa* 3, no. 1 (1 Agustus 2017): 46–60, <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v3i1.3058>.

² Dale Eickelman dan Jon Anderson, *New Media in The Muslim World: The Emerging Public Sphere*

Kemampuan media-media Islam dalam melakukan komunikasi interaktif—lantaran penggunaan media sosial sebagai kanal distribusi pesan yang masif—and konstruksi atas moralitas publik membuat dakwah terseret arus berbagai gerakan yang bersifat politis, yang umumnya melibatkan ormas-ormas Islam atau partai Islam. Dalam kasus Aksi Bela Islam tahun 2016 hingga 2017 misalnya, seruan-seruan untuk membela agama Islam tidak dapat dilepaskan dari wacana-wacana politik yang tengah berkembang ketika itu, baik yang berkaitan dengan kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta yang sedang menjabat maupun momentum pilkada yang sedang berlangsung. Selain itu, wacana "membela Islam" yang diserukan itu nyatanya juga ditumpangi oleh wacana lain, yakni "persatuan umat Islam".³

Belakangan, dakwah melalui media yang terseret gerakan politik ini bukannya tanpa masalah. Penetrasi dakwah tanpa batas melalui berbagai kanal tidak hanya berdampak pada perluasan ranah publik muslim, tetapi juga pada terbentuknya konstituensi politik bahkan pasar identitas islami. Konstruksi moralitas publik oleh media selalu menjadi instrumen ampuh untuk memobilisasi massa yang dapat berkembang menjadi alat kepentingan politik pragmatis. Gejala ini terlihat pada ormas-ormas Islam, kelompok-kelompok Islam, dan pesantren-pesantren yang mendukung Aksi Bela Islam yang, ternyata,

(Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2003), 1–2.

³ Arie Setyaningrum Pamungkas, "Mediatisasi Dakwah, Moralitas Publik dan Komodifikasi Islam di Era Neoliberalisme," *Maarif* 13, no. 1 (Juni 2018): 55–75.



memiliki varian latar belakang ideologi berbeda-beda.⁴ Dalam konteks ini, maka dimensi politik tampak lebih dominan dari dimensi dakwah itu sendiri.

Dalam catatan sejarah Indonesia, pemanfaatan media untuk kepentingan dakwah dan politik sudah berlangsung sejak lama. Media Islam sudah tumbuh dan berkembang sejak awal 1900-an, seturut tumbuh dan berkembangnya media massa itu sendiri. Kebangkitan media ini tentu tidak dapat dilepaskan dari momentum pergerakan nasional di Indonesia, dan kebijakan politik etis Pemerintah Hindia Belanda cukup memberi dampak atas hal tersebut. Seiring mulai dijalankannya politik etis, maka kesadaran nasional dan pergerakan sosial-politik pun mulai menggeliat di kalangan terpelajar bumiputra. Mereka menggunakan pers untuk menyuarakan perbaikan bangsanya. Maka media massa kala itu sangat kental dengan warna kesadaran baru yang hendak ditanamkan kepada kaum pribumi.⁵

Adalah *Bintang Hindia* yang menjadi media massa pertama bumiputra yang memiliki kesadaran nasional. Media ini menggunakan bahasa Melayu dan pertama kali terbit tahun 1903. Perusahaan penerbitan bernama N.J. Boon adalah badan usaha yang berada di balik

terbitnya surat kabar tersebut, yang ternyata bekerjasama dengan seorang terpelajar bernama Abdul Rivai dan seorang pensisunan KNIL,⁶ bernama H.C.C. Clockener Broussons. Abdul Rivai adalah aktor di balik artikel-artikel yang kemudian diterbitkan *Bintang Hindia*, sedangkan Broussons lebih banyak mengurus sirkulasi dan penyebaran media tersebut.⁷ Di saat yang relatif sama, kelompok-kelompok Islam pun juga mulai memiliki kesadaran nasional. Media massa dijadikan sebagai alat perjuangan oleh aktivis-aktivis pergerakan Islam. Apalagi di saat yang sama pergerakan politik Islam juga tengah menggeliat hebat di beberapa daerah karena menghadapi maraknya kristenisasi oleh Belanda.⁸

Media massa pertama dari kelompok Islam adalah *Medan Prijaji* yang terbit tahun 1907. Tirto Adhi Soerjo, seorang terpelajar yang lahir di Bojonegoro tahun 1880, adalah aktor di balik lahir dan berkembangnya media ini. *Medan Prijaji* terbit di bawah naungan perusahaan penerbitan bernama N.V. Medan Prijaji yang didirikan Tirto Adhi Soerjo sendiri dan Haji Mohammad Arsal.⁹ Kala itu, seluruh pengelola *Medan Prijaji* berasal dari kalangan bumiputra. Berdirinya *Medan Prijaji* merupakan tonggak baru untuk perkembangan media-media selanjutnya selama masa kolonialisme di nusantara.¹⁰

⁴ Pamungkas.

⁵ Miftahul Habib Fachrerozi, "Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra," *Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah* 2, no. 1 (2019): 13–25.

⁶ KNIL atau Koninklijk Nederlandsche-Indische Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda adalah angkatan perang kolonial Hindia Belanda. KNIL didirikan oleh Belanda pada tahun 1830 dengan tujuan dan tugas khusus. KNIL terdiri dari setengah tentara Eropa dan setengahnya berasal dari tentara

pribumi. Namun, sejak tahun 1830-an akhir, anggota KNIL lebih banyak diisi tentara pribumi.

⁷ Harry A. Poeze, *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Belanda (1600-1950)* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 44–46.

⁸ Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 17.

⁹ Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula* (Jakarta: Hasta Mitra, 1985), 49.

¹⁰ Fachrerozi, "Politik Etis Dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra."

Di Jawa, perkembangan media-media Islam sangat masif dan cepat. Setelah *Medan Prijaji*, ada banyak media-media Islam yang muncul di berbagai kota di Pulau Jawa. Misalnya saja di Surabaya ada surat kabar *Otoesan Hindia* dan *Bendera Islam*; di Surakarta ada *Medan Moeslimin* dan *Islam Berberak*; di Yogyakarta ada *Soeara Muhammadiyah*, *Pandji Islam* dan *Penaboer*; dan di Bandung ada *Pembela Islam* yang terbit di bawah naungan Persatuan Islam (Persis). Media-media itu acapkali dijadikan alat untuk mendiseminasi visi-misi atau ideologi kepada masyarakat karena sifatnya yang intensif dan terus berkelanjutan.¹¹ Sebagai sumber pembelajaran Islam, media-media Islam pada masa pergerakan itu bahkan mampu menggeser kitab kuning.¹²

Menariknya, meskipun media-media Islam pada masa itu akhirnya juga terseret perkara politik, namun mereka tidak pernah kehilangan semangat dakwahnya. Menyebarluaskan ajaran dan kebenaran Islam seolah sudah menjadi misi yang dipegang teguh oleh setiap aktivis pergerakan Islam yang berada di balik media-media tersebut. Tampaknya nuansa ideologis tidak pernah lenyap dalam setiap produk jurnalisme yang dihasilkan. Hal ini misalnya terlihat pada sikap *Otoesan Hindia* dalam merespons surat kabar *Djawi*

Hisworo, media asal Surakarta yang dipimpin Marthodarsono—sorang jurnalis penganut kejawen—yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad. Pada Januari 1918 *Djawi Hisworo* menerbitkan artikel bertajuk “Pertjakapan antara Marto dan Djojo”. Dalam artikel itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad minum arak dan mengkonsumsi candu. Sehari setelah artikel itu terbit, sebenarnya polemik belum muncul ke permukaan. Saat itu, kebanyakan media lebih banyak menyoroti masalah politik terkait rencana Volksraad¹³ yang akan memilih anggota-anggotanya dari kalangan bumiputra.¹⁴

Namun, pada 30 Januari 1918 *Otoesan Hindia* menerbitkan artikel bertajuk “Si Djahat Menghina Nabi SAW” yang membantah segala tuduhan terkait Nabi Muhammad oleh *Djawi Hisworo*. Adalah Abikusno Tjokrosujoso, salah satu petinggi Sarekat Islam (SI) yang juga adik kandung H.O.S Tjokroaminoto, yang menulis artikel tersebut. Tak berselang lama, *Medan Moeslimin* ternyata juga menerbitkan artikel yang sama sebagai bentuk pembelaan.¹⁵ Isu penghinaan terhadap Nabi Muhammad ini pun terus bergulir dan menjadi isu nasional. Puncaknya adalah ketika pada 6 Februari 1918 H.O.S Tjokroaminoto mendirikan TKNM¹⁶

¹¹ Arditya Prayogi dan Ardiyan Darutama, “Sikap politik surat kabar fadjar asia: Respon politis atas isu pergerakan nasional 1927-1930,” *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 12, no. 2 (31 Juli 2022): 154, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i2.9656>.

¹² Jajat Burhanudin, “The Fragmentation of Religious Authority: Islamic Print Media in Early 20th Century Indonesia,” *Studia Islamika: Indonesian Journal For Islamic Studies* 11, no. 1 (2004): 23-62.

¹³ Volksraad atau Dewan Rakyat merupakan lembaga parlemen yang berwenang sebagai penasihat

Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië).

¹⁴ Ahmad Fajar, “Politisasi Isu Agama di Media Massa: Strategi Politik Hos Cokroaminoto dalam Surat Kabar Djawi Hisworo (1918),” *Journal of Islamic History* 1, no. 1 (15 Juni 2021): 78-100, <https://doi.org/10.53088/jih.v1i1.115>.

¹⁵ Fajar.

¹⁶ TKNM atau Tentara Kandjeng Nabi Muhammad, dibentuk di Surabaya dengan H.O.S Tjokroaminoto—yang juga menjabat pimpinan Sarekat Islam—sebagai ketuanya. Sementara itu, Sosrokardono ditunjuk

sebagai wadah bagi umat muslim untuk menjaga martabat nabi dan agamanya.¹⁷

Dalam kasus lain, *Pembela Islam* yang terbit di Bandung juga sangat kental dengan nuansa dakwah islamiyahnya yang khas. Perdebatan salah seorang tokoh penting Persis, Moh. Natsir, dengan Sukarno tentang negara Islam dan negara sekuler bermula dari salah satu artikel Natsir yang diterbitkan media ini. Selain itu, *Pembela Islam* juga banyak sekali menerbitkan tulisan-tulisan Natsir yang berupaya mempertahankan posisi Islam dari serangan kristenisasi yang didukung oleh penguasa kolonial. Tulisannya yang paling banyak diingat orang di *Pembela Islam* adalah yang bertajuk "Zending Contra Islam", terbit pada 1931.¹⁸

Studi ini bermaksud mengkaji secara mendalam dinamika dakwah-politik media-media Islam selama masa pergerakan nasional di Pulau Jawa. Kajian sejarahnya mencoba mengeksplorasi lebih jauh muatan-muatan dakwah dari media-media Islam masa pergerakan, serta relasinya dengan gerakan politik yang memang sudah menjadi jalan perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Harapannya, hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi media-media Islam

yang juga melakukan dakwah di era kontemporer, karena realitas politik senantiasa dinamis dan gerakan dakwah pasti akan selalu terhubung dengan realitas tersebut. Studi ini bertitikangsa dari tahun 1907 hingga 1942; dimulai sejak awal kali munculnya media Islam pribumi hingga berakhirnya masa kolonialisme Belanda yang ditandai dengan pendudukan Balatentara Dai Nippon di Indonesia. Studi ini juga meminjam pandangan sejarawan Takashi Shiraishi, yang menyebut era pergerakan politik melawan kolonialisme di Jawa sebagai radikalisme rakyat.¹⁹

Secara metodologi, studi ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahap, mulai dari pemilihan topik, heuristik (penelusuran sumber), kritik sumber atau verifikasi, interpretasi (penafsiran fakta sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah).²⁰ Data-data didapat dari sumber kepustakaan yang bersifat primer maupun sekunder, baik itu berupa buku-buku sejarah maupun artikel sejarah yang membahas sejarah pergerakan dan media Islam, dengan verifikasi data menggunakan metode triangulasi sumber. Perbedaan data diselesaikan dengan analisis kasus negatif, yakni dengan mempelajari dan

sebagai sekretaris, dan Syekh Ambarak bin Thalib (pimpinan Al Irsyad Surabaya) sebagai bendahara. Di saat kasus penghinaan kepada Nabi Muhammad menjadi isu nasional, puluhan ribu umat Islam bergabung dalam TKNM. Lihat hasil penelitian Juma, "Kontinuitas dan Transformasi Penistaan Agama", *Jurnal Lektor Keagamaan*, Vol 16, No . 02, Tahun 2018.

¹⁷ Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), 177-178.

¹⁸ Howard M Federspiel, "The Persatuan Islam (Islamic Unions)" (Montreal, Institute of Islamic Studies, Mc.Gill University, 1966), 47.

¹⁹ Pandangan Takashi Shiraishi yang dimaksud mengacu pada penelitiannya yang berjudul "An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926", yang merupakan desertasinya di Cornell University, 1990. Hasil penelitian tersebut sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia pertama kali oleh Pustaka Utama Grafiti tahun 1997 dengan judul *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Diterbitkan ulang oleh Marjin Kiri dengan judul sama pada tahun 2023.

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 69-80.

menganalisis secara mendalam pada sumber-sumber yang menampilkan data berbeda. Adapun kepenulisan sejarah (historiografi) sangat tergantung pada kondisi objektif (tersedianya sumber) sekaligus kondisi subjektif, yaitu kemampuan penulis sejarah itu sendiri.²¹

Berdasarkan studi-studi yang selama ini berkembang, perkembangan kelompok Islam—termasuk pula media-media Islam di dalamnya—selama masa pergerakan lebih banyak dibaca dari perspektif gerakan sosial-politik. Hal ini terlihat pada studi-studi sejarah yang banyak dirujuk dan dibukukan.²² Begitu juga dengan studi-studi lain yang mengkaji media Islam masa pergerakan secara spesifik. Misalnya studi berjudul "Voices of Islamic Reform: A Study on Islamic Press in Indonesia, 1900-1942" yang ditulis Imas Emilia, yang mengkaji media-media Islam masa pergerakan dari tinjauan sosial-politik dan sumbangsinya pada nasionalisme. Ada pula studi berjudul "Islamic Press In Surakarta (1914-1926): A Study of Medan Moeslimin and Islam Bergerak" yang ditulis Nor Huda Ali dkk, yang juga mengkaji dua media pergerakan (*Medan Moeslimin dan Islam Bergerak*) dari kacamata ideologi politik, serta kaitannya dengan perkembangan sosialisme dan nasionalisme Indonesia. Maka, studi ini berusaha memberi perspektif baru terkait sejarah perkembangan gerakan keislaman melalui

media selama masa pergerakan. Tanpa menghilangkan sisi politisnya, studi ini berupaya menajamkan pembacaan sejarah melalui perspektif gerakan dakwah.

Jurnalisme Dakwah

Jurnalisme dakwah adalah kegiatan jurnalistik atau kegiatan yang bergerak di ranah informasi serta penerbitan yang mengabdikan dirinya pada nilai-nilai agama Islam. Dalam konteks ini, tekanannya tentu pada media pers, baik itu berupa surat kabar harian, majalah, tabloid, atau bentuk-bentuk media lainnya. Melalui media pers itulah pesan-pesan yang bermuatan dakwah akan disebarluaskan melalui berbagai karya tulis. Karya tulis melalui media pers bentuknya beragam, mulai dari berita, artikel, laporan, tajuk rencana, *feature*, dan bentuk-bentuk karya jurnalistik lainnya.²³

Sebagai jurnalisme yang mengedepankan ajaran Islam, maka jurnalisme dakwah juga dapat dianggap sebagai *crusade journalism* atau jurnalisme yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu yang dianggap benar dan suci. Hal ini terlihat pada bagaimana posisi jurnalisme dakwah ini yang mengembangkan misi rohani, terutama dalam misi '*amar ma'ruf nahi munkar*'.²⁴ Di tengah persaingan pesan dan ide-ide di tengah khalayak, jurnalisme dakwah menawarkan

²¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 58.

²² Misalnya saja studi dari Takashi Shiraishi yang sudah disebut sebelumnya. Lalu ada studi dari Deliar Noer berjudul "The Rise and Development of The Modernist Movement in Indonesia". Penelitian tersebut sudah dialihbahasakan dan dibukukan dengan judul *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Ada pula misalnya studi dari Robert van Niel

yang berjudul "The Emergence of The Modern Indonesian Elite", 1960. Sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Munculnya Elite Modern Indonesia*, 1984.

²³ Sudirman Tebba, *Jurnalisme Baru* (Ciputat: Kalam Indonesia, 2005), 9.

²⁴ Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: Teraju, 2004), 6.

gagasan *the idea is the message*²⁵, artinya bagaimana nilai-nilai agama dapat dibungkus dalam bentuk pesan yang kompetitif pada khalayak yang sama.²⁶

Dalam proses kerjanya, jurnalisme dakwah tetap berpegang teguh pada metode jurnalistik dalam usaha mencapai tujuannya.²⁷ Proses kerja jurnalisme dakwah mulai dari meliput informasi, mengolahnya, hingga menyebarluaskannya melalui berbagai kanal dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik juga norma-norma yang bersumber dari Islam, yakni Al-Qur'an dan sunah rasul.²⁸ Setiap muslim berpotensi untuk berperan sebagai jurnalis muslim. Mengutip pandangan Asep Syamsul Romli, setidaknya ada lima peran jurnalis muslim, antara lain sebagai *muaddib* (pendidik), *musaddid* (pelurus imformasi tentang ajaran dan umat Islam), *mujaddid* (pembaharu pemahaman tentang Islam), *muwahid* (pemersatu atau perekat ukhuwah Islamiyah), dan *mujahid* (pejuang, pembela, dan penegak agama dan umat Islam).²⁹

Dalam proses kerjanya, seorang jurnalis muslim harus memiliki sikap tegas dalam usaha memperjuangkan dakwah Islamiyah melalui karya tulisnya. Produk jurnalistik

harus diproduksi dengan cara-cara berkeadaban, bukan dengan cara barbarian—bersifat kasar dan tidak memperhatikan kode etik. Sebab, kehadiran media-media Islam di tengah masyarakat sebetulnya untuk melaksanakan tugas para nabi.³⁰

Namun, dalam beberapa kasus, produk pers yang cenderung abai terhadap kode etik juga tak dapat dihindari. Meminjam pandangan Choirul Mahfud (2014), jurnalisme Islam setidaknya bisa digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu jurnalisme profetik dan jurnalisme provokatif. Jurnalisme profetik adalah jurnalisme kenabian. Jurnalisme tipe ini lebih mengedepankan pencerahan, kedamaian, pendidikan, dan usaha membuka pikiran kepada khalayak agar dapat memahami Islam secara lebih esensial. Penyebaran informasi dan berita harus dengan cara yang santun, ramah, dan dialogis. Informasi yang disampaikan lebih mengutamakan kualitas berita alih-alih dogma tertentu yang dianggap benar. Dengan karakteristik seperti itu, jurnalisme profetik punya semangat jihad untuk membangun masyarakat multikultural yang damai.³¹ Hal ini tentu sebagaimana ajaran Nabi Muhammad pula, yang dalam dakwahnya banyak mengedepankan

²⁵ Penulis meyakini kalau frasa ini terinspirasi oleh Marshall McLuhan, yang pernah mengemukakan sebuah tesis: *the medium is the message*. Di sisi lain, "The Medium is The Message" adalah salah satu judul bab dari bukunya yang berjudul *Understanding Media: The Extensions of Man*, 1964. Bab "The Medium is The Message" bisa diakses melalui laman: <https://web.mit.edu/allanmc/www/mcluhan.medium.message.pdf>

²⁶ Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), xviii.

²⁷ Kustadi Suhandang, *Manajemen Pers Dakwah: Dari Perencanaan hingga Pengawasan* (Bandung: Marja, 2007), 19.

²⁸ Kasman, "Jurnalistik Dakwah (Sebuah Model Komunikasi Islami)."

²⁹ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Dakwah: Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 27.

³⁰ Ramli.

³¹ Choirul Mahfud, "Ideologi Media Islam Indonesia Dalam Agenda Dakwah: Antara Jurnalisme Profetik dan Jurnalisme Provokatif," *Jurnal Dakwah* 15, no. 1 (2014): 1-18.

pendekatan kesadaran pengetahuan dan moralitas, seiring dengan banyaknya informasi dan pengetahuan tentang multikulturalisme dalam ayat-ayat Al-Qur'an.³² Sebaliknya, jurnalisme provokatif adalah tipe jurnalisme yang cenderung menciptakan permusuhan. Media digunakan sebagai alat untuk memprovokasi. Informasi dan berita disajikan dengan bahasa yang cenderung normatif, intimidatif, provokatif, serta anti dialogis.³³ Jurnalisme provokatif tentu membawa dampak buruk, mulai dari kebencian, kekerasan, hingga konflik. Sangat berbeda dengan jurnalisme profetik yang sangat menjunjung tinggi etika jurnalisme, sehingga akurasi data dan validasi data sangat diperhatikan. Jurnalisme profetik juga harus menghadirkan informasi yang santun dan bernilai edukatif, sehingga mengarah pada penyadaran, pencerahan, dan perdamaian. Dengan prinsip ini, media Islam bertugas menyebarkan risalah yang bermanfaat bagi setiap insan berdasarkan cinta sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Swt.³⁴ Untuk kepentingan menampilkan citra Islam yang sesungguhnya—Islam sebagai agama rahmatan lil alamiin, maka sudah sepatutnya jurnalisme profetik dijadikan sebagai pilihan *maqam* media-media Islam dalam kerja-kerja jurnalistik mereka.

Dakwah dan Politik

³² Agung Teguh Prianto, "Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural dalam Perspektif Al-Qur'an," *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (22 Juli 2023): 193–210, <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v1i1.15>.

³³ Mahfud, "Ideologi Media Islam Indonesia Dalam Agenda Dakwah: Antara Jurnalisme Profetik dan Jurnalisme Provokatif."

³⁴ Dian Muhtadiah, "Peran Jurnalisme Profetik Menghadapi Hoax," *Jurnal Dakwah Tabligh* 18, no. 2 (22

Hubungan antara dakwah dan politik sering tidak bisa dimengerti dengan baik. Bahkan, sebagian orang—terutama umat Islam—sering menganggap dakwah dan politik bekerja sendiri-sendiri, tidak saling berkaitan. Ada pula anggapan bahwa berbeda dengan dakwah, politik identik dengan ambisi, hipokrasi, kelicikan, dan hal-hal yang konotasinya negatif. Padahal, dakwah dan politik sebenarnya memiliki hubungan yang sifatnya organik. Keduanya tidak harus dipertentangkan dan dapat berjalan beriringan. Lebih dari itu, keduanya juga memiliki hubungan fungsional.³⁵

Secara harfiah, dakwah adalah seruan, do'a, panggilan, dan juga propaganda.³⁶ Maka secara kebahasaan dakwah dapat dimaknai sebagai upaya menyeru kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat berjalan di jalan kebenaran sebagaimana tuntunan Islam. Namun, dakwah juga dapat dipahami dalam pengertian yang lebih jauh, misalnya sebagai penerjemahan, penjabaran serta pelaksanaan Islam dalam perikehidupan dan penghidupan—termasuk di dalamnya kehidupan politik, ekonomi, kebudayaan, kesenian, dan lain-lain. Dakwah dalam konteks ini memiliki ini makna luas, seluas kehidupan dan penghidupan itu sendiri.³⁷

Mohammad Al-Naquib Al-Attas menyebut proses dakwah sebagai islamisasi.

November 2017): 181–200, <https://doi.org/10.24252/jdt.v18i2.4701>.

³⁵ Syamsul Bachri Day, "Hubungan Politik dan Dakwah," *MEDIATOR* 6, no. 26 (2005): 7–16.

³⁶ A Subandi, *Ilmu Dakwah* (Bandung: Yayasan Syahida Bandung, 1994), 10.

³⁷ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok - Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 159.

Baginya, islamisasi adalah proses pembebasan manusia, terutama dari tradisi-tradisi yang bersifat mitologis, mistis, animistik dan segala budaya irasional lainnya. Selain itu, islamisasi juga pembebasan manusia dari pengaruh-pengaruh yang selama ini membelenggu tingkah laku dan pemikiran manusia.³⁸ Hal ini juga didukung oleh fakta historis bahwa rasionalitas dalam Islam telah diajarkan sejak zaman nabi dan diteruskan di masa sahabat.³⁹ Dari titik ini, maka dapat dipahami bahwa dakwah senantiasa berkarakter progresif. Dakwah juga cenderung tidak akan menerima *status quo* jika keadaan itu bertentangan dengan tuntunan Islam. Di sisi lain, gerakan dakwah juga selalu berbicara perubahan, dan perubahan itu dapat bersifat reformatif ataupun revolusioner. Semua bergantung pada situasi sosial-politik, ekonomi, kebudayaan, serta keadaan mental-psikologis masyarakat.⁴⁰

Anggapan bahwa dakwah adalah upaya rekonstruksi masyarakat berdasarkan ajaran Islam sebagaimana diungkap di atas akhirnya membawa pada pemikiran bahwa gerakan dakwah dan politik memang punya kaitan yang erat. Semua bidang atau lapangan sosial dapat menjadi arena dakwah, dan semua aktivitas hidup di masyarakat dapat dikonstruksi menjadi alat dakwah. Sebagaimana bidang sosial lainnya, kegiatan politik mestinya dapat

dijadikan sebagai alat dakwah oleh umat Islam.⁴¹

Politik acapkali didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan, atau tentang cara-cara penggunaan kekuasaan.⁴² Namun, dalam pengertian lebih luas, politik juga dapat dipahami sebagai upaya atau proses yang berhubungan dengan pengelolaan pemerintahan atau pengelolaan negara.⁴³ Dalam konteks bahwa politik adalah alat dakwah, maka gerakan politik yang dilakukan haruslah paralel dengan gerakan dakwah itu sendiri. Artinya politik harus ditegakkan dengan prinsip etis dan nilai-nilai sebagaimana dakwah itu diperjuangkan. Gerakan politik yang berani menyatakan yang benar adalah benar dan yang batil adalah batil adalah ciri-ciri gerakan politik yang menjadi sarana dakwah.⁴⁴

Syamsul Yakin (2019) mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga paradigma yang melingkupi hubungan dakwah dan politik. Menurutnya, dakwah sebagai produk budaya tidak dapat lepas dari politik, yang jika ditelaah hubungan keduanya dapat berbentuk simbiotik, integralistik, dan instrumentalistik. Dalam paradigma simbiotik, dakwah dan politik saling membutuhkan satu sama lain. Dakwah membutuhkan politik, karena dengan politik maka dakwah akan jadi

³⁸ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam And Secularism* (Kuala Lumpur: Art Printing Works Sdn. Bhd, Istac, 1978), 41.

³⁹ Suwari dan Dedy Pradesa, "Rasionalitas Islam dalam Dakwah: Perspektif Normatif dan Historis," *INTELEKSI: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 5, no. 2 (29 Desember 2023): 241-62, <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v5i2.277>.

⁴⁰ Day, "Hubungan Politik dan Dakwah."

⁴¹ Day.

⁴² Muhtar Habibdin, *Memahami Kekuasaan Politik* (Malang: UB Press, 2017), 2.

⁴³ Usman Usman, "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (20 Juni 2015): 130-39, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1506>.

⁴⁴ Day, "Hubungan Politik dan Dakwah."

lebih berkembang. Di sisi lain, politik juga membutuhkan dakwah, karena dengan dakwah maka politik lebih memiliki idealisme dalam bingkai etika dan moralitas. Lalu, dalam paradigma integralistik dakwah dan politik dipandang memiliki hubungan yang integral. Artinya politik adalah suatu wilayah yang merupakan bagian dari dakwah. Berdasarkan paradigma ini, politik adalah lembaga dakwah. Selanjutnya, dalam paradigma instrumentalistik maka politik semata-mata dianggap sebagai instrumen atau alat untuk mengembangkan dakwah.⁴⁵

Tumbuh dan Berkembangnya Media-Media Islam di Jawa (1907-1942)

Kemunculan media-media Islam di Jawa tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik yang melingkupinya. Awal abad ke-20 adalah masa-masa ketika mulai tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan bumiputra di Indonesia. Pendudukan dan pemerintahan kolonial Belanda terhadap masyarakat Indonesia yang sebelumnya tercaci berai justru memicu adanya sebuah komunitas yang dibayangkan (*imagined community*), yang pada perkembangan berikutnya mengarah pada pencarian identitas serta integrasi nasional.⁴⁶ Sementara itu, kebijakan politik etis Belanda yang mulai diperkenalkan sejak tahun 1901 juga

memicu munculnya kelompok sosial baru, yang dikenal sebagai golongan elite modern atau priayi baru.⁴⁷ Dikarenakan tingkat pendidikan dan status sosialnya, golongan ini di satu sisi tetap mewarisi kebudayaan elite tradisionalnya, namun di sisi lain juga memiliki nilai, pandangan, dan cita-cita dalam menyikapi realitas sosial di sekitar mereka. Ada gagasan kemajuan yang ingin diimplementasikan oleh golongan elite modern ini.

Golongan elite modern ini pulalah yang memelopori pergerakan nasional dan menjadi agen pembaharuan. Untuk mewujudkan cita-cita nasional, ada banyak cara yang dilakukan. Membentuk organisasi-organisasi pergerakan dan media (pers) adalah dua hal yang dianggap paling efektif dalam menopang perjuangan. Pers adalah suatu media komunikasi kepada publik yang dianggap paling modern saat itu. Sebagaimana yang sering diungkap, organisasi pergerakan dan pers adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya tumbuh secara organik dan keduanya saling membutuhkan.⁴⁸

Di saat yang sama, pers juga memainkan peranan penting dalam memodernisasi gerakan keislaman di awal abad ke-20. Kemunculan media Islam ini memang lebih dulu di Pulau Sumatra dengan lahirnya majalah *al-Moenir* yang diinisiasi ulama-

⁴⁵ Syamsul Yakin, "Dakwah Politik dalam Paradigma Simbiotik," *Jurnal Komunikasi Islam* 9, no. 1 (1 Juni 2019): 58-81, <https://doi.org/10.15642/jki.2019.9.1.58-81>.

⁴⁶ Benedict Anderson, *Imagined Community: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso Books, 1990), 15.

⁴⁷ William H Frederick, *Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Surabaya dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)* (Jakarta: Gramedia, 1989), 43.

⁴⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2* (Jakarta: Gramedia, 1993), 113-14.

ulama Minangkabau.⁴⁹ Organisasi organisasi Islam yang ada di Jawa barulah kemudian mengikuti langkah tersebut, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Persis. Organisasi keislaman dengan medianya secara tidak langsung mengubah warna gerakan Islam itu sendiri, dari gerakan tradisional menjadi gerakan modern.⁵⁰

Di Jawa, lahirnya media Islam dimulai oleh seorang keturunan priayi bekas pelajar STOVIA bernama Raden Mas Djokomono alias Tirto Adhi Soerjo. Sebelumnya, pada tahun 1906 Tirto Adhi Soerjo memparakarasi berdirinya sebuah perserikatan para priayi dan bangsawan bernama Sarekat Priyayi. *Vergadering*⁵¹ pertama perserikatan ini dilaksanakan di Meester Cornelis (Jati Negara), dan sejak perserikatan dibentuk pertama kali jumlah anggotanya telah mencapai 700 orang.⁵² Kemudian, seiring terus meningkatnya jumlah anggota, keberadaan surat kabar menjadi penting dalam rangka menjalin warta di antara semua anggota. Pada tanggal 1 Januari 1907 terbitlah pertama kali surat kabar yang diberi nama *Medan Prijaji*. Awalnya *Medan Prijaji* terbit mingguan, namun seiring semakin meningkatnya permintaan menjadi terbit harian.⁵³ Moto surat kabar tersebut adalah "*Oentoeq Radja-radja bangsawan asali, bangsawan pikiran, prijaji-prijaji dan kaum moeda dari bangsa pribumi serta bangsa*

jang dipersamahken di sehloeroeh Hindia-olanda"⁵⁴ Oplah *Medan Prijaji* terhitung sangat besar pada zaman itu, secara kuantitas sampai menyentuh angka 2.000 eksemplar.⁵⁵

Namun, pesatnya perkembangan *Medan Prijaji* rupanya tidak dibarengi dengan peningkatan pengelolaan Sarekat Priyayi secara keorganisasian. Kekuatan organisasi ini kian melemah. Faktor paling dominan yang menjadi sebab adalah kacaunya administrasi keuangan dan dasar organisasi yang hanya bertumpu pada konsolidasi priayi bumiputra.⁵⁶

Namun, runtuhan Sarekat Priyayi nyatanya tidak memadamkan semangat Tirto Adhi Soerjo untuk terus berserikat. Pada 1909 ia mendirikan Sarekat Dagang Islamiah (SDI) di Bogor, setelah sebelumnya ia menolak tawaran dr. Soetomo untuk bergabung ke organisasi Budi Utomo. Istilah "Dagang" sengaja digunakan karena pedagang dianggap sebagai kelompok sosial yang punya kebebasan paling tinggi, bebas dari tekanan penguasa. Hal tersebut tentu sangat berbeda dengan kelompok priayi yang masih belum bebas betul dari kungkungan kolonialisme. Kemudian atas keorganisasian dengan mantap diputuskan menggunakan dasar Islam. Bersamaan dengan itu, *Medan Prijaji* tetap memainkan peranan pentingnya sebagai

⁴⁹ Emilia Imas, "Voices of Islamic Reform: A Study on Islamic Press in Indonesia, 1900-1942," *TAWARIKH: International Journal for Historical Studies* 7, no. 2 (2016): 201-24.

⁵⁰ Irpan Iskandar dan Dede Wahyu Firdaus, "Pemikiran Deliar Noer Mengenai Gerakan Islam Modern Indonesia 1900-1942," *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* 1, no. 1 (2 Desember 2020): 16-38, <https://doi.org/10.51190/jazirah.v1i1.2>.

⁵¹ Pertemuan atau rapat besar; rapat umum.

⁵² Nasihin, "Islam Dan Kebangsaan: Studi Tentang Politik Islam Masa Pergerakan Nasional Di Indonesia," *Jurnal Rihlah* 2, no. 1 (2014): 11-26.

⁵³ Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, 44.

⁵⁴ Nasihin, "Islam Dan Kebangsaan: Studi Tentang Politik Islam Masa Pergerakan Nasional Di Indonesia."

⁵⁵ Toer, *Sang Pemula*, 66.

⁵⁶ Nasihin, "Islam Dan Kebangsaan: Studi Tentang Politik Islam Masa Pergerakan Nasional Di Indonesia."

alat pengembangan SDI. Media ini difungsikan sebagai agen bagi penyebaran SDI di berbagai daerah.

Kemudian, tahun 1911 Tirto Adhi Soerjo terlibat pembentukan organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta. Saat itu, Haji Samanhudi, seorang saudagar batik di Laweyan, Surakarta, sedang bermasalah dengan pemerintah setempat terkait organisasi perkumpulan yang didirikannya. Organisasi perkumpulan tersebut bernama Rekso Roemekso, sebuah organisasi "ronda" dan tolong menolong di antara sesama pedagang batik dalam menghadapi para kecu. Kala itu wilayah Laweyan memang sangat tidak aman.⁵⁷ Singkat cerita, karena Rekso Roemekso tidak memiliki status hukum yang jelas maka ia terancam dibubarkan. Tirto Adhi Soerjo lantas diminta untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ia datang ke Surakarta dan menyusun anggaran dasar perkumpulan milik Haji Samanhudi itu dan mengganti namanya menjadi Sarekat (Dagang) Islam. Pimpinan *Medan Prijaji* itu kemudian mengumumkan di surat kabarnya bahwa telah didirikan cabang SDI Bogor di Surakarta. Dibentuknya cabang tersebut memang tidak bertentangan dengan anggaran dasar SDI Bogor yang hanya mensyaratkan

anggota lebih dari 50 orang untuk pembentukan cabang organisasi.⁵⁸

SDI Surakarta berkembang pesat. Dalam waktu singkat anggotanya sudah mencapai 300 ribu orang dan menjadi organisasi terbesar saat itu.⁵⁹ Gerakannya kian tak terbendung setelah masuknya H.O.S Tjokroaminoto, sosok karismatik dari Surabaya.⁶⁰ Dikarenakan tujuan awal pembentukan SDI adalah merangkul semua pribumi tanpa terkecuali, nama organisasi kemudian diganti jadi Sarekat Islam (SI). Perubahan itu tersurat dalam anggaran dasar baru yang diresmikan pada tanggal 10 September 1912. Sejak itu nama yang digunakan tidak lagi SDI, melainkan SI.⁶¹ Kemajuan SI selanjutnya lebih banyak ditopang oleh SI cabang Surabaya yang banyak mengorganisir masyarakat di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto. Pimpinan SI Surabaya itu tak lama kemudian diangkat menjadi *Hoofdbestuur*⁶² SI.⁶³ Hal tersebut agaknya juga dipengaruhi karakteristik Tjokroaminoto sebagai orator ulung.⁶⁴ Selain itu, tokoh berkarisma tersebut memang sudah dikenal sebagai orang yang kerap menentang pemegang kekuasaan, baik yang berasal dari kalangan Belanda maupun pribumi. Ia pun begitu cepat menjadi tokoh pemimpin

⁵⁷ Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926*, 55-56.

⁵⁸ Nasihin, "Islam Dan Kebangsaan: Studi Tentang Politik Islam Masa Pergerakan Nasional Di Indonesia."

⁵⁹ Bernard Dahm, *Sukarno And The Struggle For Indonesian Independence* (Ithaca: Cornell University Press, 1969), 13-14.

⁶⁰ Anggit Rizkianto, "Kepemimpinan Karismatik H.O.S. Tjokroaminoto Di Sarekat Islam," *Inteleksia - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 2, No. 1 (21 Agustus 2020): 55-80, <https://Doi.Org/10.55372/Inteleksiajpid.V2i1.71>.

⁶¹ Menurut Shiraishi (1997) organisasi ini sedari awalnya telah bernama Sarekat Islam. Hanya saja

orang-orang Surakarta menyebutnya Sarekat Dagang Islam. Hal ini lantas dipertegas kembali oleh Shiraishi lewat kalimatnya sebagai berikut: "Dalam kenyataannya, perkumpulan ini dari segi organisasi mengacu pada Rekso Roemekso yang merupakan organisasi ronda dan bukan pada perkumpulan dagang, seperti SDI Bogor." Lihat Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), 57.

⁶² Pimpinan Besar.

⁶³ Sartono Kartodirdjo, *Sarekat Islam Lokal* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975), 271.

⁶⁴ Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 158.

pergerakan rakyat.⁶⁵ Sementara itu, Tirto Adhi Soerjo, tokoh di balik SDI Bogor, pada hari-hari berikutnya harus berhadapan dengan hukum kolonial karena terkena tuntutan *persdelict*⁶⁶ dan menjalani pembuangan.⁶⁷ Maka, secara tidak langsung organisasi ini telah diakuisisi oleh Haji Samanhudi dan Tjokroaminoto.

Selain memimpin yang berkarisma, Tjokroaminoto rupanya juga penulis piawai. Agaknya hal inilah yang membuat SI banyak berjuang dan menyuarakan kepentingan-kepentingannya melalui media. Tahun 1912 Tjokroaminoto sudah mendirikan surat kabar *Otoesan Hindia* yang ia pimpin sendiri. Tiga tahun kemudian SI menerbitkan majalah yang diberi nama *Al Islam*. Majalah ini cukup frontal dalam menggelorakan agama dan politik, dan kerap menggunakan istilah "bangsa Islam tanah Hindia". Kemudian, surat-surat kabar lain juga tumbuh seturut tumbuhnya cabang-cabang SI di berbagai kota di Jawa. Seperti *Pantjaran Warta* dan *Kaoem Moeda* di Bandung, *Sinar Djawa* di Semarang, *Saratomo* dan *Medan Moeslimin* di Surakarta. Selain media-media itu, tokoh-tokoh penting SI juga ada yang menerbitkan media sendiri, yang dapat diketahui misalnya Agus Salim dan Abdul Moeis yang mendirikan surat kabar *Neratja*. Adapun media-media lain yang juga melibatkan Agus Salim dan juga

Tjokroaminoto adalah *Hindia Baru*, *Bendera Islam*, dan *Fadjar Asia*. Media-media itu menjadi lahan bagi aktivisme anggota-anggota SI. Selain menyuarakan soal-soal agama, mereka juga gencar dalam menyuarakan masalah-masalah sosial-politik, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan kolonial. Mulai dari masalah praktik kuli kontrak, kerja rodi, hingga eksploitasi tanah sewa kontrak.⁶⁸

Setiap kota-kota besar di Jawa, yang di dalamnya bercokol organisasi besar Islam, gairah menerbitkan media seolah tumbuh begitu saja secara organik. Di Yogyakarta, tempat lahirnya Muhammadiyah, pada tahun 1915 terbit majalah *Soeara Muhammadiyah*. K.H. Ahmad Dahlan terlibat dengan menjadi bagian pimpinan redaksi majalah ini.⁶⁹ Selain *Soeara Muhammadiyah*, ada juga beberapa surat kabar lain yang terafiliasi dengan Muhammadiyah, antara lain *Pandji Islam*, *Penaboer*, *Bintang Islam*, dan *Adil*.⁷⁰ Adapun 'Aisyiyah—organisasi sayap Muhammadiyah khusus perempuan—juga menerbitkan surat kabar dengan nama *Soeara Aisijah* yang mulai terbit sejak awal 1925.⁷¹

Di Bandung, pada 1929 terbit majalah *Pembela Islam* yang berada di bawah naungan Persis. Artikel-artikel dalam

⁶⁵ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 347.

⁶⁶ Kejadian atau tindak pidana yang dilakukan melalui pers.

⁶⁷ Shirashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, 45.

⁶⁸ Sa'diyah dan Suradji, "Dinamika Industri Media Islam di Indonesia sebagai Gerakan Dakwah."

⁶⁹ Sandya Sahisnu Prabaswara Dan Muhammad Wildan, "Kontribusi Suara Muhammadiyah Bagi Pengembangan Masyarakat Islam Di Indonesia (1915-

1957)," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 19, No. 2 (2 Januari 2023): 229-42, <https://DOI.Org/10.15575/Al-Tsaqafa.V19i2.21108>.

⁷⁰ Ahmat Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness, 1855-1913* (New York, Ithaca: Cornell University, 1995), 108-24.

⁷¹ M. Raihan Febriansyah dkk., *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), 59.

majalah tersebut tidak hanya ditulis oleh anggota-anggota Persis saja, tetapi juga oleh tokoh-tokoh Islam yang dinilai cerdas pada masa itu dan pemikiran keislamannya sejalan dengan Persis.⁷². Menurut Deliar Noer, pembaca *Pembela Islam* tidak hanya dari kalangan internal Persis saja, tetapi umat Islam secara luas, termasuk orang-orang Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Persebarannya juga tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga sampai ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, bahkan ke Negeri Jiran dan Thailand.⁷³ Sayangnya, media Islam ini hanya terbit sampai tahun 1935. Masalah keuangan dan larangan terbit oleh pemerintah kolonial adalah sebab terhentinya penerbitan. Namun, Persis masih memiliki dua majalah lain yang jadi senjata pergerakannya, yakni majalah *al-Fatwaa* dan *al-Lisan*. Majalah *al-Lisan* sendiri mampu bertahan sampai tahun 1942 ketika penjajahan Dai Nippon dimulai.⁷⁴

Menariknya, geliat penerbitan media ternyata tidak hanya terjadi di kalangan Islam modern, tetapi juga di kalangan Islam tradisional. Kelompok Islam tradisional nyatanya tidak hanya berdiam diri ketika menyaksikan pergerakan kelompok Islam modern yang sangat progresif. Di Jawa, mereka mengorganisasikan diri dengan pembentukan Nahdatul Ulama (NU) pada tahun 1926. Kemudian, mereka juga mengadopsi gerakan Islam modern dalam hal metode dakwah dan penerbitan media. Beberapa media yang dapat ditemukan misalnya *Suara NU*, *Berita NU*, *Soeloeh NU*. Pengelolaannya dipimpin langsung K.H. Wahid Hasyim dan didampingi K.H. Mahfudz Shiddiq. Media-media milik NU itu banyak membincangkan persoalan-persoalan pendidikan pesantren dan madrasah.⁷⁵

Persebaran media-media Islam berdasarkan afiliasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 – Persebaran Media-Media Islam dan Afiliasinya

No	Nama Media Islam	Afiliasi Organisasi
1	<i>Medan Prijaji</i>	Sarekat Prijaji Sarekat Dagang Islamiah
2	<i>Otoesan Hindia</i>	
3	<i>Al Islam</i>	
4	<i>Pantjaran Warta</i>	
5	<i>Kaoem Moeda</i>	
6	<i>Sinar Djawa</i>	Sarekat Islam
7	<i>Saratomo</i>	
8	<i>Medan Moeslimin</i>	
9	<i>Neratja</i>	

⁷² Howard M Federspiel, *Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX* (Yogyakarta: UGM Press, 1996), 26.

⁷³ Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, 103.

⁷⁴ Abdul Kadir Badjuber, "Historiografi Majalah *Pembela Islam*," *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis*,

Da'wah Melanjutkan 1, no. 02 (4 Agustus 2018): 67-77, <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v1i02.12>.

⁷⁵ Sa'diyah Dan Suradji, "Dinamika Industri Media Islam Di Indonesia Sebagai Gerakan Dakwah."

No	Nama Media Islam	Afiliasi Organisasi
10	<i>Hindia Baru</i>	
11	<i>Bendera Islam</i>	
12	<i>Fadjar Asia</i>	
13	<i>Soeara Muhammadiyah</i>	
14	<i>Pandji Islam</i>	
15	<i>Penaboer</i>	
16	<i>Bintang Islam</i>	Muhammadiyah
17	<i>Adil</i>	
18	<i>Soeara Aisijah</i>	
19	<i>Pembela Islam</i>	
20	<i>Al-Fatwaa</i>	Persis
21	<i>Al-Lisan</i>	
22	<i>Suara NU</i>	
23	<i>Berita NU</i>	Nahdlatul Ulama
24	<i>Soeloeh NU</i>	

Dinamika Dakwah Media-Media Islam Masa Pergerakan

Sebagai pelopor, tidak sulit untuk memahami bahwa *Medan Prijaji* adalah media yang membawa semangat perubahan. Meski dakwah islamiyahnya tidak terlalu kentara, tapi kenyataan kalau Tirto Adhi Soerjo adalah orang yang mencoba mengangkat derajat pedagang-pedagang Islam di Hindia Belanda menunjukkan bahwa terdapat misi kenabian dalam pengelolaan *Medan Prijaji*. Ada suatu pengharapan akan masa depan yang lebih baik dari apa yang diperjuangkan. Kesadaran yang dibangun lewat jalan jurnalisme itu adalah usaha untuk mengubah keadaan bangsa yang penuh kezaliman menuju bangsa yang lebih berkeadilan. *Medan Prijaji* sendiri kerap menyerukan agar bangsa Indonesia jangan sampai tertinggal dari bangsa-

bangsa lain. Untuk itu, media tersebut kerap menjadikan perihal kemajuan bangsa lain, seperti Turki, India, Cina, dan Jepang sebagai konten pemberitaannya.⁷⁶

SI yang banyak sekali melahirkan media Islam juga berjuang dengan karakteristik serupa. Pergerakan organisasi ini bertumpu pada sebuah ideologi dalam upaya menyadarkan umat akan nasib mereka, yang kemudian termanifestasi dalam trilogi gerakan SI, yakni sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasah. Trilogi tersebut merupakan rujukan primer dalam setiap perumusan gerakan organisasi. Prinsip sebersih-bersih tauhid lantas menjadi lokomotif pergerakan dalam hal membentuk kepribadian muslim yang sejati.⁷⁷ Pasalnya, melalui sekulerisme yang disemaikan penguasa kolonial,

⁷⁶ Suwirta, "Zaman Pergerakan, Pers, Dan Nasionalisme Di Indonesia."

⁷⁷ Hariya Toni, "Dakwah Syarikat Islam Dan Kontribusinya Dalam Masyarakat Indonesia," *Anida*

(*Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*) 20, no. 2 (30 Desember 2020): 221-38, <https://doi.org/10.15575/anida.v20i2.10602>.

agama Islam telah terdorong jauh ke belakang di tengah-tengah masyarakat pribumi. Di lapangan politik, batas-batas toleransi agama mengintervensi politik juga sangat terbatas, sehingga pemisahan politik dan agama sangat tegas.⁷⁸ Lalu kondisi ini diperparah dengan maraknya kristenisasi. Di sisi lain, SI juga dihadapkan pada persoalan ketidakmurnian ajaran agama Islam yang ada di masyarakat.⁷⁹

Dalam dakwahnya, SI sangat fokus pada persoalan ketauhidan dan perbaikan moralitas. Namun yang menjadi ciri khas dari dakwah kelompok ini adalah paham keagamaan yang diserukan bukanlah sesuatu yang terlalu melangit, tetapi begitu membumi karena dekat dengan persoalan umat.⁸⁰ Dalam kongres SI tahun 1913 di Surakarta, Tjokroaminoto mengampanyekan pembasmian "Tujuh M", yakni *main* (berjudi), *madon* (nafsu seks), *minum* (mabuk), *madat* (candu), *mangani* (makan berlebihan), *maling* (mencuri) dan *misuh* (memaki).⁸¹ Media-media SI seperti *Otoesan Hindia* dan *Kaoem Moeda* kemudian aktif menyuarakan agar kaum pribumi meninggalkan perjudian dan perbuatan asusila, serta lebih bekerja keras untuk memperbaiki kualitas hidup. Pada tahun 2013 *Otoesan Hindia* menulis bahwa kaum pribumi harus lebih berikhtiar agar kondisi ekonominya lebih baik sebagaimana bangsa-bangsa asing. Sedangkan *Kaoem*

Moeda memuat karangan yang berisikan kecaman terhadap kemalasan orang-orang Indonesia.⁸²

Kemudian, media-media SI juga banyak melempar diskursus ke publik berkenaan dengan pemikiran-pemikiran keislaman dengan warna kebaruan dan modernitas. Misalnya saja *Otoesan Hindia* yang pada awal tahun 1916 memuat karangan yang mengetengahkan persoalan Islam dan gagasan persatuan (nasionalisme). Media asal Surabaya itu menyebut Islam dapat menjadi "semen pengikat" puluhan juta warga Indonesia. Media itu juga menyebut bahwa Islam dapat menjadi alat untuk mengangkat rasa cinta tanah air.⁸³ Di Surakarta, *Medan Muslimin* yang dipimpin Haji Misbach—seorang tokoh Islam berpikiran kiri-progresif—tampil sebagai media pembela Islam yang sangat gigih. Kegigihan itu terlihat pada satu karangan yang ditulis Haji Misbach berjudul "Sroean Kita". Karangan itu mengulas salah satu ayat di Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 15. Tujuannya untuk menekankan bahwa siapapun yang mengaku muslim maka ia harus membela agamanya, karena barang siapa yang perbuatannya mengkhianati perkataannya maka ia seorang muslim palsu.⁸⁴ Media ini juga mewacanakan pemikiran-pemikiran baru yang mencoba

⁷⁸ Indrawati, "Memeta Tipe Sekulerisme Islam di Indonesia 1920-1945 Sebagai Landasan Dakwah," *INTELEKSI: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 5, no. 2 (21 Februari 2024): 461–80, <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v5i2.267>.

⁷⁹ Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya Pada Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2017), 107.

⁸⁰ Anggit Rizkianto, "Dakwah Dan Pendidikan Sarekat Islam Sebagai Fase Pembuahan Nilai-Nilai Pancasila,"

JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) 7, no. 1 (3 Juni 2022): 25–36.

⁸¹ Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*, 51–52.

⁸² Korver, 51.

⁸³ Korver, 66.

⁸⁴ Fuad Faizi, "Moderating Resistances: The Reproduction of Muslim Religious Space in the Dutch East Indies," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 61, no. 2 (22 Desember 2023): 297–328, <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.612.297-328>.

"mengawinkan" Islam dan sosialisme.⁸⁵ Hal serupa dapat pula dilihat pada satu karangan yang diterbitkan *Sinar Djawa* pada 1916. Dalam karangan tersebut dibahas secara mendalam tentang pengertian sosialisme. Penulisnya bahkan berpandangan bahwa sosialisme tak ubahnya nasionalisme.⁸⁶ Pasalnya, perjuangan melawan penjajahan juga sesuatu yang diperjuangkan sosialisme. Pada kongres SI di Bandung di tahun yang sama, karangan terbitan media Semarang itu lantas direspon dengan panjang lebar oleh Hasan Ali Surati⁸⁷ lewat pidatonya. Hasan Ali Surati menyebut bahwa ia juga menaruh perhatian pada cita-cita sosialisme dalam Islam yang punya kekhasannya sendiri. Menurutnya, Nabi Muhammad adalah seorang sosialis sejati karena ia melesapkan batas-batas perbedaan manusia dari berbagai golongan dan martabat. Sosialisme Islam juga telah diterapkan nabi di berbagai bidang, mulai ekonomi, politik, dan keagamaan. Hasan Ali Surati juga menyinggung perihal zakat, yang menurutnya juga berkarakter sosialis, karena golongan kaya harus merelakan sebagian kekayaannya untuk golongan miskin setiap tahunnya.⁸⁸

Adapun *Soeara Muhammadiyah* yang terbit sejak 1915 juga konsisten menyerukan gagasan modern di bidang keislaman.

⁸⁵ Nor Huda Ali dkk., "Islamic Press In Surakarta (1914-1926): A Study of Medan Moeslimin and Islam Bergerak," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2023): 214-43.

⁸⁶ A.P.E. Korver (1985) menyebut bahwa penulis karangan tersebut adalah Semaoen, pemimpin SI Semarang. Namun, Korver sendiri sepertinya tidak yakin, sebab ia hanya menulis "Penulisnya mungkin Semaoen". Lihat A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta: Grafitipers, 1985), 62.

Namun, media milik Muhammadiyah ini juga tetap memuat konten-konten tentang pengetahuan keagamaan yang sifatnya dasar. Misalnya saja dalam satu karangan yang berjudul "Poeasa dan Penghidoepan Setjara Islam". Karangan itu memuat prinsip-prinsip dasar tentang ibadah puasa yang harus dijalani setiap muslim, yang kemudian juga dilengkapi rubrik tanya jawab masalah agama. Muhammadiyah menyadari bahwa di tengah peradaban kolonial masih banyak masyarakat nusantara yang belum memahami Islam dengan benar.⁸⁹ Di sisi lain, *Soeara Muhammadiyah* juga kerap menyuarakan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan umat Islam. Rupanya perubahan sosial masyarakat Hindia Belanda karena mulai merangseknya kapitalisme cukup menarik perhatian Muhammadiyah. Dalam suatu karangan, *Soeara Muhammadiyah* mengingatkan pembacanya bahwa harta benda hanyalah titipan Allah semata. Harta benda itu harus digunakan sebaik-baiknya sebagaimana tuntunan agama. Media itu juga mengingatkan agar umat Islam harus menghindari budaya konsumerisme. Caranya adalah dengan mengeluarkan zakat sebagai kewajiban sosial mereka.⁹⁰ Perihal zakat ini, *Soeara Muhammadiyah* juga menyebut bahwa itu adalah suatu instrumen untuk membantu saudara-saudara sesama muslim agar

⁸⁷ Hasan Ali Surati adalah seorang keturunan India. Ia masuk ke SI bersamaan dengan Tjokroaminoto, kemudian menjadi orang penting di *Oetoesan Hindia* yang mengurus masalah keuangan.

⁸⁸ Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*, 62.

⁸⁹ Prabaswara dan Wildan, "Kontribusi Suara Muhammadiyah Bagi Pengembangan Masyarakat Islam Di Indonesia (1915-1957)."

⁹⁰ Charles Tripp, *Islam and the Moral Economy, The Challenge of Capitalism* (New York: Cambridge University Press, 2006), 56.

dapat keluar dari jurang kemiskinan. Ekonomi, bagi Muhammadiyah, adalah suatu konsep yang dimaknai sebagai kendaraan untuk menuju kemandirian masyarakat.⁹¹

Di Bandung, sebagaimana telah disinggung, media yang sangat besar gaungnya dalam membela Islam adalah *Pembela Islam*. Pembentukan media ini diawali dengan dibentuknya *Comite Pembela Islam* di Bandung.⁹² Keputusan penting yang berkaitan dengan pembentukan *Pembela Islam* dalam *comite* itu adalah menjadikan media sebagai instrumen untuk meluruskan pemahaman yang salah dan menyebarkan kebenaran yang berkaitan dengan Islam. Meski seringkali dianggap frontal dalam membela Islam, namun jika merujuk "pengumuman" media itu pada edisi pertamanya, maka akan didapati bahwa media Persis ini sebenarnya punya semangat berdakwah dengan santun dan mengedepankan akhlak. Pada edisi pertamanya itu tertulis pengumuman, "... Cukuplah kalau kami katakan bahwa nama surat kabar bulanan ini telah menunjukkan maksudnya, yaitu *Pembela Islam*. Maksud kami ialah akan membela Islam, dengan cara sopan dan sabar."⁹³ Hanya saja,

Pembela Islam juga mewadahi kalau seandainya perdebatan-perdebatan dan polemik memang tidak terhindarkan atau bahkan diperlukan.⁹⁴ Oleh karena itu, dalam edisi pertamanya juga tertulis, "Tetapi kalau perlu dengan cara apa saja (maksudnya bila perlu dengan acara debat terbuka), kita akan mengatakan yang haq dengan beralasan Al-Qur'an dan hadis."⁹⁵ Dalam salah satu edisi *Pembela Islam* tahun 1933, media ini pernah memuat perihal perdebatan yang terjadi sebanyak dua kali antara Ahmad Hassan dengan seorang tokoh Ahmadiyah bernama Abu Bakar Ayyub. Perdebatan keduanya adalah tentang hadis-hadis kenabian, yang secara umum menerangkan bahwa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, namun justru disalahartikan oleh kelompok Ahmadiyah. Pemicu perdebatan ini tentu saja pengakuan Mirza Gulam Ahmad—seorang rohaniawan asal Qadian, India, sekaligus pendiri gerakan Ahmadiyah—yang mendaku sebagai nabi.⁹⁶

Dakwah *Pembela Islam* pada dasarnya adalah hendak menyemaikan ketaatan beribadah dan amaliah di tengah kehidupan umat Islam Indonesia. Namun, lewat karangan-karangannya, media ini juga menaruh perhatian pada persoalan

⁹¹ Rechardus Deaz Prabowo, "Pemikiran Modernisasi Ekonomi Bumiputra Dalam Surat Kabar Boedi Oetomo Dan Soeara Moehammadijah Di Hindia Belanda (1920-1928)," *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 3, no. 1 (10 Desember 2019): 33-54, <https://doi.org/10.33652/handep.v3i1.55>.

⁹² *Comite Pembela Islam* atau Panitia Pembela Islam adalah sebuah kepanitiaan yang sengaja dibentuk dalam merespons berbagai serangan dan celaan-celaan kepada agama Islam, baik melalui rapat-rapat umum, koran, majalah, buku-buku, dan bentuk lain. Dibentuk pada malam 20-21 Ramadan tahun 1347 H. Diketuai oleh KH. Muhammad Zamzam dengan wakilnya H. Mahmoed. Ahmad Hassan, pimpinan Persis, bertindak sebagai penasehat.

⁹³ Badjuber, "Historiografi Majalah Pembela Islam."

⁹⁴ Hal ini juga sebagaimana yang ditulis Deliar Noer, "Berlainan dari Muhammadiyah yang mengutamakan penyebaran pemikiran-pemikiran baru secara tenang dan damai, Persis seakan gembira dengan perdebatan-perdebatan dan polemik." Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1990), 103.

⁹⁵ Badjuber, "Historiografi Majalah Pembela Islam."

⁹⁶ Aris Munandar, "Konsep Dakwah Ahmad Hassan Dan Implementasinya Dalam Gerakan Dakwah Persis (Studi Kasus Debat Di Majalah Dan Di Pesantren Persatuan Islam)," *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Da'wah* 4, no. 2 (2021): 1-14.

peran agama dalam kehidupan politik dan berbangsa. Tampaknya ini bukan tanpa alasan, karena pemikiran-pemikiran baru yang berkaitan dengan nasionalisme atau konsep kebangsaan tengah memuncak sebagai mesin penggerak kesadaran politik demi melawan kolonialisme. Persis dengan *Pembela Islam*-nya seolah ingin memainkan peran sebagai penjaga kemurnian esensi ajaran agama di tengah menyeruaknya pembaharuan pikiran politik. Tiada maksud lain selain supaya umat Islam tidak melampaui batas menurut ukuran-ukuran Persis sendiri. Misalnya dapat dilihat pada tulisan Ahmad Hassan yang mewanti-wanti potensi bahaya dari nasionalisme yang digagas Bung Karno. Menurut Ahmad Hassan, nasionalisme menyimpan potensi bahaya, karena dapat berkembang menjadi fanatisme kesukuan sebagaimana pernah eksis di masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad. Bagi Ahmad Hassan, fanatisme atau asabiah terhadap identitas suku-bangsa dapat membuat umat Islam lebih menomorsatukan kepentingan suku-bangsa alih-alih kepentingan agamanya, dan agama Islam melarang hal itu. Dalam satu karangannya di *Pembela Islam*, Ahmad Hassan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. "Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang yang bukan Arab...", demikian bunyi hadis tersebut.⁹⁷ Pandangan senada juga disuarakan Moh. Natsir. Lewat karangannya di *Pembela Islam*, Natsir sama sekali tidak menolak nasionalisme.

Menurutnya, kecintaan terhadap bangsa adalah sesuatu yang telah mandarah daging dan tidak bisa dilepaskan. Hanya saja, menurutnya setiap umat Islam harus mencintai agamanya melebihi kecintaannya terhadap apapun.⁹⁸

Berkaitan dengan maraknya sekulerisme di bumi nusantara, media-media milik NU lantas bersuara. *Berita NU* misalnya, pada tahun 1940 memuat karangan yang berisi telaah kritis terhadap sekulerisme dari sudut pandang Islam. Media itu mengatakan Nabi Muhammad memang tidak diutus untuk membangun negara Islam, namun Islam yang disyiaran Nabi Muhammad adalah seperangkat aturan yang cakupannya berdimensi agama dan dunia. "Islam adalah sekumpulan undang-undang dari Tuhan yang menyusun dan memimpin manusia menuju arah kebijakan dan kepentingannya di dalam peri-kehidupan dan peri-keakhiratannya," demikian yang tertuang di media resmi milik NU tersebut.⁹⁹ Di tahun yang sama, *Berita NU* juga mewacanakan bahwa Indonesia yang merdeka nantinya dapat menjadikan Al-Qur'an, sunnah, dan ijтиhad sebagai sumber hukum. Al-Qur'an dan sunnah menentukan yang sifatnya dasar-dasar saja, sedangkan ijтиhad berperan dalam pengimplementasian dasar-dasar yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan sunnah. Bagi NU, ijтиhad bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, karena di manapun terdapat maslahat (kebaikan bersama), maka di situlah *syara'* Islam.¹⁰⁰

⁹⁷Faujian Esa Gumelar dan R.M. Mulyadi, "Polemik A. Hassan dan Muchtar Luthfi Mengenai Paham Kebangsaan (1929-1935)," *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 10, No. 3 (8 November 2018): 523, <https://DOI.Org/10.30959/Patanjala.V10i3.420>.

⁹⁸ Gumelar Dan Mulyadi.

⁹⁹ Muhammad Ainun Najib, "Nu, Soekarno Dan Staat Islam: Wacana Negara Islam Dalam Berita Nahdlatu Oelama (Bno)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 1 (1 Juli 2017): 163-84, <https://DOI.Org/10.21274/Ahkam.2017.5.1.163-184>.

¹⁰⁰ Najib.

Demikianlah, media-media yang terafiliasi dengan organisasi pergerakan itu telah memainkan perannya sebagai pers Islam sebagaimana mestinya. Jurnalisme dakwah atau jurnalisme keislaman yang diperjuangkan terfungsikan dengan baik dan nyaris sempurna. Kepedulian terhadap nasib bangsanya dan keinginan kuat untuk mengubah keadaan yang dirasa memilukan, mendorong mereka menjadi corong-corong perubahan, yang membuat mereka tidak hanya menjadi penyampai atau pelurus informasi, tetapi juga sebagai pendidik, pejuang, pemikir, pemersatu, sekaligus pembaharu. Peran pembaharuan yang dimainkan media-media Islam posisinya sangat penting dalam arus perubahan sosial-politik bangsa Indonesia, yang dapat meneguhkan simpulan bahwa jurnalisme yang diperjuangkan adalah jurnalisme profetik. Bawa apa yang mereka perjuangkan adalah jurnalisme kenabian yang membawa misi kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Media-media Islam juga turut menciptakan diskursus gagasan-gagasan baru, termasuk gagasan kebangsaan. Ini semakin menguatkan pandangan yang sudah ada sebelumnya, bahwa Islam adalah satu-satu unsur *genuine* dalam pembentukan nasionalisme Indonesia.¹⁰¹ Islam, pada akhirnya, juga banyak memberi warna pada corak identitas kebangsaan pada pembabakan sejarah Indonesia selanjutnya.

Mutualisme Dakwah dan Politik Media Islam Masa Pergerakan

Meski tidak dinyatakan secara terang benderang, nuansa politis beberapa media Islam masa pergerakan sudah dapat dibaca sedari awal kemunculannya. Pada kasus *Medan Prjjaji* misalnya, sudah tampak gerakan politiknya dalam melawan pemerintah kolonial ketika media itu memilih menggunakan bahasa Melayu rendahan sejak pertama kali menerbitkan berita-beritanya. Selain karena bahasa tersebut lebih bersifat demokratis, Tirto Adhi Soerjo juga mengungkapkan alasan lainnya. Menurutnya, "... bahasa itu bakal kalahkan dan musnahkan sama sekali bahasa Melayu-tinggi atau Melayu *Ophuijsen* yang masih dilindungi oleh *Government*".¹⁰² Kemudian, jika menilik aspek personal Tirto Adhi Soerjo sendiri, maka akan terlihat tindakan-tindakan yang memang didorong oleh keinginan melindungi rakyat kecil yang jadi korban kesewenang-wenangan pejabat kolonial. Juga untuk membangkitkan kesadaran rakyat itu agar tergerak melakukan suatu perlawanan, sebagaimana yang diungkapkannya, "... dengan bekerja sebagai redaktur koran, saya bisa menggerakkan hati bangsa dan mengubah mereka yang masih tidur nyenyak agar mulai menyadari kewajibannya".¹⁰³

Menariknya, jika melihat media yang terafiliasi dengan SI, dalam beberapa kasus justru nuansa politis cukup dinyatakan secara tegas. Surat kabar

¹⁰¹ Azyumardi Azra, "Antara Kesetiaan dan Perbenturan," *Kalam* 3 (1994): 45.

¹⁰² Claudine Salmon, "Apakah dari Sudut Linguistik Istilah Bahasa MelayuTionghoa Dapat Diterima?,"

dalam *Citra Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983), 109-10.

¹⁰³ Toer, *Sang Pemula*, 397.

Fadjar Asia yang dikelola Tjokroaminoto dan Agus Salim secara terang menyatakan surat kabar mereka adalah surat kabar yang berdasarkan politik keislaman. Hal itu semacam "prinsip" penerbitan, dan selalu terpampang dalam setiap edisi surat kabar.¹⁰⁴ Kemudian, redaktur media ini juga menyebut bahwa *Fadjar Asia* adalah media umum pergerakan, dan secara khusus pergerakan Islam Indonesia yang punya maksud mencapai kemerdekaan Indonesia.¹⁰⁵ Maka, cukup teranglah bahwa media ini mencoba melawan status quo. Sikap politik *Fadjar Asia* yang melawan kekuasaan agaknya juga dipengaruhi oleh nuansa pergerakan tahun 1920-an yang makin memanas dan menjadi ajang pertarungan kuasa dan ideologi. Lebih jelasnya lagi, sikap politik media tersebut tampak pada satu karangan yang ditulis oleh Agus Salim pada 1928 yang berjudul "Politiek Moeslim". Lewat tulisannya itu Agus Salim membantah tuduhan-tuduhan bahwa politik Islam yang diusung olehnya dan juga *Fadjar Asia* bermaksud memecah belah persatuan dan tidak punya jiwa nasionalis. Agus Salim lantas meluruskan bahwa Islam justru mempersatukan bangsa yang terpecah belah. Tidak ada masalah antara patriotisme dengan Islam. Islam, tegas Agus Salim, menyandarkan kecintaan tanah airnya pada Al-Qur'an, bukan semata-mata pada keduniawian.¹⁰⁶

Pada kasus lain, *Fadjar Asia* bereaksi keras terhadap penindakan orang-orang tidak bersalah oleh pemerintah kolonial pasca geger pemberontakan komunis pada akhir 1926 dan awal 1927 di beberapa daerah di

Jawa dan Sumatra Barat. Saat itu, puluhan ribu orang ditangkap, ditahan, dan dibuang. Termasuk orang-orang yang tidak tahu menahu perihal gerakan komunis. Pemerintah kolonial bertindak berlebihan. Berbagai perkumpulan dan kegiatan juga diawasi dan dikontrol ketat sehingga menghambat gerakan SI. Dalam salah satu pemberitaannya, *Fadjar Asia* sampai menyebut pemerintah dengan "politiek badjangan". Lebih lanjut, di berita itu juga tertulis, "... memang di kalangan Belanda sudah banyak yang kagetan, yang senantiasa digangu penyakit was-was setiap ada gerakan (aktivitas) yang agak besar di dalam kalangan pergerakan rakyat Islam." Namun, di terbitan-terbitan selanjutnya *Fadjar Asia* juga menulis adanya harapan terhadap pemerintah agar dapat melakukan pengawasan dengan lebih bijaksana; dapat membedakan dengan benar, mana rakyat yang terlibat komunisme dan mana yang tidak. Menariknya, pada terbitan yang lain lagi, *Fadjar Asia* justru mengungkapkan keberpihakannya pada pemberontakan. Hanya saja, bukan berarti mereka setuju dengan komunisme dan aksi-aksi anarkis. Keberpihakan itu lebih didasari oleh keadaan masyarakat pribumi yang menderita akibat penindasan dan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial.¹⁰⁷

Jika dirunut ke belakang, sebenarnya tidak sulit menemukan sikap-sikap politis dari media-media SI yang lain. *Oetoesan Hindia* pernah menerbitkan karangan yang isinya adalah protes terkait ketidakadilan hukum

¹⁰⁴ Ardiya Prayogi, *Pers dan Pergerakan* (Makasar: Mitra Ilmu, 2023), 5.

¹⁰⁵ Prayogi dan Darutama, "Sikap politik surat kabar fadjar asia."

¹⁰⁶ Prayogi dan Darutama.

¹⁰⁷ Prayogi dan Darutama.

penguasa. Pada 1914, *Pantjaran Warta* juga pernah menyuarakan protes terkait perbedaan gaji antara pegawai pribumi dan pegawai Belanda dengan tingkat ijazah yang sama di perusahaan milik pemerintah. *Pantjaran Warta* menolak argumen pemerintah yang mengatakan orang pribumi memiliki kebutuhan hidup lebih sedikit. Di tahun yang sama, media SI tersebut menerbitkan karangan berjudul "Dia Cuma Orang Jawa", yang memuat berita tentang kecelakaan kereta api di Sumatra. Seorang perempuan Jawa berstatus janda yang jadi korban kecelakaan hanya menerima ganti rugi sebesar 5 ribu gulden. Sementara itu, seorang warga Inggris yang juga korban kecelakaan, menerima ganti rugi sebesar 50 ribu gulden.¹⁰⁸

Di Surakarta, pada 1915 *Medan Moeslimin* aktif menyuarakan perihal kebijakan diskriminatif pemerintah dalam bidang pendidikan. Media itu mengkritik perihal sekolah-sekolah khusus pribumi yang minim sekali pengajaran agamanya jika dibandingkan Hollandsche Chineesche School, sekolah khusus anak-anak Tionghoa. Pada 1919, media tersebut menerbitkan artikel bertajuk "Vergadering SATV Bagian Sekolah tahun 1919" yang mengabarkan tentang rencana organisasi Sidik Amanah Tablig Vatonah (SATV)¹⁰⁹ membuka sekolah-sekolah Islam. Saat itu, di Surakarta memang tengah marak berdiri sekolah-sekolah milik pemerintah dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh

organisasi zending. Sekolah-sekolah Islam didirikan dengan maksud lebih mencerdaskan orang-orang Islam pribumi dan sekaligus untuk membendung kristenisasi.¹¹⁰ Tak hanya itu, *Medan Moeslimin* juga aktif mengadvokasi para buruh di perkebunan milik pengusaha Belanda yang jadi korban eksplorasi, yang menyebabkan mereka kelaparan karena kekurangan pangan. Lewat artikel bertajuk "Pembela Agama Islam", media itu mengabarkan bahwa Haji Misbach menentang keras eksplorasi terhadap rakyat, dan memobilisasi masyarakat lewat pertemuan-pertemuan terbuka untuk mengambil sikap dan melawan.¹¹¹

Dari kalangan Muhammadiyah, sikap politik terhadap hegemoni kolonialisme juga tampak dari konten dan penggunaan bahasa dari *Soeara Muhammadiyah* sejak 1920-an. Sebagaimana telah disinggung, jurnalisme *Soeara Muhammadiyah* tak dapat dilepaskan dari prinsip tajdid Muhammadiyah sebagai organisasi induknya. Maka pada tahun 1922 media itu menerbitkan tulisan yang membahas tentang "Islam sebagai agama nalar" yang menyerukan pentingnya penyebaran ide-ide atau nalar berkemajuan sebagai respons atas kesengsaraan yang ditimbulkan akibat kolonialisme. Sebelumnya, pada 1921—beberapa tahun sebelum Sumpah Pemuda—media itu sudah menyuarakan pentingnya perintisan suatu bahasa baru, bahasa persatuan, yang mampu menyatukan

¹⁰⁸ Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*, 45.

¹⁰⁹ Organisasi ini merupakan perkumpulan tablig Islam bercorak reformis yang didirikan oleh Haji Misbach di Kampung Kauman, Surakarta.

¹¹⁰ Agus Triyanta, "Fajar Pers Muslim Bumi Putra Di Masa Hindia Belanda: Wacana Anti Kapitalisme dalam

Majalah *Medan Moeslimin* (1915-1926)," *PANANGKARAN: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 112-29.

¹¹¹ Triyanta.

seluruh kelompok masyarakat pribumi. Maka, pada 1923, *Soeara Muhammadiyah* sudah mendeklarasikan penggunaan bahasa Indonesia—yang masih dengan corak Melayu—and menggunakan kata “Indonesia” dalam konten-konten jurnalistiknya.¹¹² Untuk sikap politik yang lebih jelas, dapat dilihat pada media lain yang juga terafiliasi dengan Muhammadiyah, yaitu *Bintang Islam*. Media ini dikelola Fachroddin, kader tulen Muhammadiyah yang dididik langsung oleh K.H. Ahmad Dahlan. Pada 1926, melalui *Bintang Islam* Fachroddin dengan sangat keras mengkritik kebijakan ordonansi guru¹¹³ pemerintah kolonial. Menurut Fachroddin, kebijakan itu adalah upaya Belanda untuk terus mempertahankan kekuasaan di Indonesia. Namun selain itu, Muhammadiyah juga sangat dirugikan karena banyak guru-guru Muhammadiyah yang kesulitan mengajar lantaran harus mendapat izin dari bupati.¹¹⁴

Sementara itu, gerakan politis media-media Persis justru melampaui persoalan-persoalan kebijakan kolonial. Sikap politik Persis yang tampil di media benar-benar menampakkan ideologinya. Sebagaimana telah disinggung, tokoh-tokoh Persis seperti Natsir dan Ahmad Hassan sebetulnya tidak serta merta menolak nasionalisme, tetapi yang mereka takutkan adalah penolakan agama dalam

kehidupan bernegara. Persis sangat mengkhawatirkan gagasan nasionalisme yang diselubungi sekulerisme. Maka, hal inilah yang pada akhirnya membuat Persis tidak hanya menentang penguasa kolonial, tetapi juga saling berebut pengaruh dengan beberapa kelompok nasionalis-sekuler. Dalam salah satu kesempatan Ahmad Hassan menulis, “Pemisahan agama dari *staat*, sebagaimana di Eropa itu, Tuan Soekarno anggap modern dan radikal. Tuan Soekarno tidak tahu, bahwa orang Eropa pisahkan agama Kristen dari *staat* itu, tidak lain lantaran di dalam agama Kristen tidak ada cara mengatur pemerintahan. Dari zaman Nabi Isa sampai sekarang belum terdengar ada satu *staat* menjalankan hukum Kristen.”¹¹⁵ Itu adalah tanggapan Ahmad Hassan terhadap Bung Karno yang mewacanakan gagasan pemisahan agama dari negara dan merujuk pada bangsa-bangsa Eropa.

Tokoh Persis lainnya, Isa Anshary, mengemukakan pandangan tentang kedudukan negara. Menurutnya, negara adalah alat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Bukan alat bagi kelompok borjuis yang difungsikan untuk menindas sebagaimana yang dipersepsi kelompok komunis dan marxis. Agaknya pandangan Isa Anshary ini didorong oleh kekhawatiran masih bercokolnya gerakan komunis dan berpotensi merengkuh kekuasaan di

¹¹² Roni Tabroni, “Peran Pers Ormas Islam dalam Penggunaan Bahasa Indonesia pada Masa Pra Kemerdekaan: Kajian atas ‘Suara Muhammadiyah,’” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 2 (12 Juni 2022): 257–66, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.18497>.

¹¹³ Ordonansi Guru adalah seperangkat aturan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi proses pengajaran agama Islam. Peraturan ini tertuang dalam *Staatsblad van Nederlansch Indie*, Nomor 550 tahun 1905 yang kemudian diperbarui dalam

¹¹⁴ Zaini Dahlan, “Respons Muhammadiyah Di Indonesia Terhadap Ordonansi Guru Awal Abad XX,” *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 1, no. 1 (9 April 2020): 26, <https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i1.7173>.

¹¹⁵ Dadan Wildan Anas dkk., *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam* (Jakarta: Amana Publishing, 2015), 403.

Indonesia. Di sisi lain, para penulis di *Pembela Islam* telah mengutarakan bahwa negara harus memiliki empat rumusan. Pertama, Islam harus jadi dasar agar Al-Qur'an dan sunah dapat terimplementasi di masyarakat. Kedua, kepala negara harus dipilih, karena itu bukan jabatan yang sifatnya turun temurun. Ketiga, keputusan final negara harus dimusyawarahkan dan diputuskan bersama wakil-wakil rakyat yang terpilih. Keempat, setiap muslim wajib memilih dalam pemilu karena itu adalah pertaruhan untuk masa depan Islam.¹¹⁶

Memasuki tahun 1940-an, *Berita NU* juga aktif merespons berbagai karangan yang ditulis Bung Karno. Misalnya karangan Bung Karno yang bertajuk "Islam Sontoloyo" dan "Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara", *Berita NU* mengkritik dua karangan tersebut karena dianggap merendahkan Islam. Dalam karangan lainnya yang bertajuk "Memudakan Pengertian Islam", Bung Karno menuduh ulama fikih yang dianggapnya kaku sebagai biang keladi kemunduran umat Islam Indonesia. *Berita NU* juga menjawab tuduhan Bung Karno tersebut. Dengan bahasa santun namun tegas, media NU itu menyebut karangan Bung Karno itu baik. Maksudnya niatnya baik. Namun, di media itu juga tertulis, "Tuan Soekarno tidak mengerti seluk beluknya syara' Islam. Maka, maksud tuan (Soekarno, pen) yang boleh jadi baik itu merupakan buah dari kebalikannya."¹¹⁷ Seperti media-media Persis, *Berita NU* juga tegas menolak wacana pemisahan agama

dari negara yang diwacanakan Bung Karno. Namun menariknya, ketika Bung Karno ditangkap penguasa kolonial karena menyebarkan risalah "Mencapai Indonesia Mereka", *Berita NU* justru memuji sosok sang proklamator. Media itu seolah mengagumi Bung Karno dengan menyebutnya, "pemimpin yang gagah perkasa, terkenal ahli pidato, ahli pengarang, ahli organisasi..."¹¹⁸ Akan tetapi, tampaknya hal itu bukanlah keanehan karena pada Muktamar NU ke-15 yang diadakan di Surabaya pada 9-15 Desember 1940, NU memutuskan Bung Karno adalah sosok paling tepat untuk menjadi presiden Indonesia merdeka. Para ulama NU menilai tidak ada sosok lain yang dapat menandingi kapasitas Bung Karno untuk memimpin Indonesia. Keputusan NU itu dilandasi oleh pemikiran politik Islam yang datang dari dua ulama, yaitu al-Mawardi (w. 1058) dan al-Ghazali (w.1111).¹¹⁹

Berdasarkan fakta-fakta historis di atas, maka dapatlah dipahami bahwa gerakan dakwah media-media Islam selama masa pegerakan pada akhirnya juga bersentuhan dengan perkara-perkara politik. Keadaan masyarakat-bangsa yang serba tidak menguntungkan karena kolonialisme, membuat organisasi-organisasi pergerakan Islam tidak bisa menutup mata, sehingga memaksa mereka menggunakan media tidak hanya sebagai instrumen dakwah tetapi juga instrumen politik. Selain itu, situasi sosial-politik dengan gegap gempita pertarungan kuasa dan ideologi juga memaksa mereka

¹¹⁶ Anas dkk., 407.

¹¹⁷ Najib, "NU, Soekarno Dan Staat Islam."

¹¹⁸ Najib.

¹¹⁹ Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1998), 25.

turun ke arena politik, yang dalam konteks ini adalah pertarungan pengaruh dan wacana pemikiran kebangsaan. Maka, dalam konteks inilah gerakan politik media-media Islam tidak dapat dilepaskan dari semangat dakwah islamiyah mereka. Di satu sisi, mereka berpolitik karena memperjuangkan sesuatu yang memang penting untuk keberhasilan dakwah. Namun, di sisi lain, mereka juga punya kepentingan agar perpolitikan bangsa Indonesia tetap lurus dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Politik tidak hanya sekadar instrumen yang memperlancar dakwah, tetapi politik juga lokus yang perlu diterangi dengan dakwah. Dengan kata lain, dakwah islamiyah dan politik saling membutuhkan dan menopang satu sama lain.

Kemudian, mutualisme dakwah dan politik tersebut pada akhirnya memberi warna tersendiri pada gerakan politik media-media Islam selama masa pergerakan. Karakteristik paling menonjol dari gerakan politik media Islam kala itu adalah bahwa gerakan mereka adalah gerakan ideologis. Praktik politik mereka sangat jauh dari praktik politik pragmatis. Apa yang diperjuangkan bukanlah kekuasaan atau pengaruh semata, tetapi nilai-nilai Islam yang harus termanifestasi di dunia politik. Gerakan politik tidak didikte oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya jangka pendek, tetapi oleh keyakinan dan ide-ide yang dianggap benar. Inilah alasan kenapa surat-surat kabar SI dan Persis misalnya, terlibat dalam sumbangsih diskurus perihal ideologi kebangsaan Indonesia ketika gerakan rakyat semakin radikal melawan penjajahan. Gerakan politik media-media itu tetap terhubung

dengan misi dakwah Islamiyah dari organisasi induknya. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa gerakan-gerakan SI, Muhammadiyah, Persis, maupun NU yang bernuansa politik pada dasarnya dijewi oleh semangat dakwah mereka; bahwa semuanya harus berpegang pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dan bermuara pada penegakkan ajaran-ajaran Islam.

Kesimpulan

Gerakan dakwah dan politik media-media Islam masa pergerakan nasional di Jawa tidak dapat dilepaskan dari eksistensi dan perkembangan organisasi-organisasi keislaman pada masa itu. Media-media itu bukanlah organ yang independen dan bergerak sendiri. Karena afiliasinya, sejak terjang mereka selalu terhubung dengan misi atau agenda dari organisasi keislaman yang menaunginya dan, pada titik tertentu, menjadi alat yang dapat diandalkan untuk menyukseskan dakwah-dakwah Islam ataupun tujuan-tujuan politik. Jurnalisme dakwah yang mereka diperjuangkan dapat disebut sebagai jurnalisme profetik atau jurnalisme kenabian. Dengan selalu menjaga jarak dari status quo, jurnalisme kenabian itu selalu berorientasi pada pembaharuan. Dengan menyemaikan ajaran-ajaran Islam, mereka berharap dapat menciptakan kesadaran di tengah-tengah umat Islam yang sedang terjajah. Lebih jauh, juga diharapkan memberikan kontribusi pada wacana dan konstruksi kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Islam.

Barangkali karena karakteristik jurnalisme yang seperti itulah yang akhirnya membuat media-media Islam itu tetap

tidak kehilangan semangat dakwahnya ketika mereka terseret gerakan politik. Sebagaimana organisasi-organisasi induknya, gerakan politik media-media Islam tersebut tetap bercorak ideologis, bukan pragmatis. Produk-produk jurnalisme mereka yang bernada politis tetap terhubung dengan misi dakwah islamiyah yang menginginkan terwujudnya masyarakat-bangsa Indonesia merdeka dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam.

Maka, pada titik inilah dapat dibaca bahwa ada hubungan mutualisme antara dakwah dan politik. Dakwah membutuhkan politik agar usaha penyebaran ajaran Islam berjalan baik. Politik perlu ditopang dengan dakwah agar ia tetap berjalan "lurus". Dengan karakteristik ini, maka media Islam—juga organisasi yang menaunginya—tidak kehilangan esensinya sebagai kelompok dakwah ketika mereka memutuskan berpolitik.

Bibliografi

- Adam, Ahmat. *The Vernacular Press And The Emergence Of Modern Indonesian Consciousness, 1855-1913*. New York, Ithaca: Cornell University, 1995.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam And Secularism*. Kuala Lumpur: Art Printing Works Sdn. Bhd, Istac, 1978.
- Alfian, Ibrahim. *Perang Di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Ali, Nor Huda, Moh. Ashif Fuadi, Moh Mahbub, Dan Kamila Adnani. "Islamic Press In Surakarta (1914-1926): A Study Of Medan Moeslimin And Islam Bergerak." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 17, No. 2 (2023): 214-43.
- Anas, Dadan Wildan, Badri Khaeruman, Taufik Rahman, Dan Latif Awaludin. *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. Jakarta: Amana Publishing, 2015.
- Anderson, Benedict. *Imagined Community: Reflection On The Origin And Spread Of Nationalism*. London: Verso Books, 1990.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Wawasan Islam: Pokok - Pokok Pikiran Tentang Islam Dan Ummatnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Azra, Azyumardi. "Antara Kesetiaan Dan Perbenturan." *Kalam* 3 (1994): 45.
- Badjuber, Abdul Kadir. "Historiografi Majalah Pembela Islam." *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan* 1, No. 02 (4 Agustus 2018): 67-77. <Https://Doi.Org/10.38214/Jurnaldawahstidnatsir.V1i02.12>.
- Burhanudin, Jajat. "The Fragmentation Of Religious Authority: Islamic Print Media In Early 20th Century Indonesia." *Studia Islamika: Indonesian Journal For Islamic Studies* 11, No. 1 (2004): 23-62.
- Dahlan, Zaini. "Respons Muhammadiyah Di Indonesia Terhadap Ordonansi Guru Awal Abad XX." *Islamijah: Journal Of Islamic Social Sciences* 1, No. 1 (9 April 2020): 26. <Https://Doi.Org/10.30821/Islamijah.V1i1.7173>.
- Dahm, Bernard. *Sukarno And The Struggle For Indonesian Independence*. Ithaca: Cornell University Press, 1969.
- Day, Syamsul Bachri. "Hubungan Politik Dan Dakwah." *MEDIATOR* 6, No. 26 (2005): 7-16.
- Djaelani, Anton Timur. *Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya Pada Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2017.
- Eickelman, Dale, Dan Jon Anderson. *New Media In The Muslim World: The Emerging Public Sphere*. Bloomington And Indianapolis: Indiana University Press, 2003.

- Fachrerozi, Miftahul Habib. "Politik Etis Dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra." *Bihari: Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah* 2, No. 1 (2019): 13–25.
- Faizi, Fuad. "Moderating Resistances: The Reproduction Of Muslim Religious Space In The Dutch East Indies." *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies* 61, No. 2 (22 Desember 2023): 297–328. <Https://Doi.Org/10.14421/Ajis.2023.612.297-328>.
- Fajar, Ahmad. "Politisisasi Isu Agama Di Media Massa: Strategi Politik Hos Cokroaminoto Dalam Surat Kabar Djawi Hisworo (1918)." *Journal Of Islamic History* 1, No. 1 (15 Juni 2021): 78–100. <Https://Doi.Org/10.53088/Jih.V1i1.115>.
- Febriansyah, M. Raihan, Arief Budiman Ch, Yazid R. Passandre, M. Amir Nashiruddin, Widiyastuti, Dan Imron Nasri. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. Yogyakarta: UGM Press, 1996.
- . "The Persatuan Islam (Islamic Unions)." Institute Of Islamic Studies, Mc.Gill University, 1966.
- Frederick, William H. *Pandangan Dan Gejolak, Masyarakat Surabaya Dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Gumelar, Faujian Esa, Dan R.M. Mulyadi. "Polemik A. Hassan Dan Muchtar Luthfi Mengenai Paham Kebangsaan (1929-1935)." *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 10, No. 3 (8 November 2018): 523. <Https://Doi.Org/10.30959/Patanjala.V10i3.420>.
- Haboddin, Muhtar. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang: UB Press, 2017.
- Haidar, Ali. *Nahdlatul Ulama Dan Islam Indonesia Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia, 1998.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Juz 4*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Imas, Emilia. "Voices Of Islamic Reform: A Study On Islamic Press In Indonesia, 1900-1942." *TAWARIKH: International Journal For Historical Studies* 7, No. 2 (2016): 201–24.
- Indrawati. "Memeta Tipe Sekulerasime Islam Di Indonesia 1920-1945 Sebagai Landasan Dakwah." *INTELEKSI: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 5, No. 2 (21 Februari 2024): 461–80. <Https://Doi.Org/10.55372/Inteleksiajpid.V5i2.267>.
- Iskandar, Irpan, Dan Dede Wahyu Firdaus. "Pemikiran Deliar Noer Mengenai Gerakan Islam Modern Indonesia 1900-1942." *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan* 1, No. 1 (2 Desember 2020): 16–38. <Https://Doi.Org/10.51190/Jazirah.V1i1.2>.
- Kango, Andries. "Jurnalistik Dalam Kemasan Dakwah." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, No. 1 (2014): 105–14.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Jilid 2*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- . *Sarekat Islam Lokal*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975.
- Kasman, Suf. *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah Bi Al-Qalam Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Teraju, 2004.
- . "Jurnalistik Dakwah (Sebuah Model Komunikasi Islami)." *Jurnal Jurnalisa* 3, No. 1 (1 Agustus 2017): 46–60. <Https://Doi.Org/10.24252/Jurnalisa.V3i1.3058>.
- Korver, A.V.E. *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* Jakarta: Grafitipers, 1985.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- . *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan, 2001.
- . *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Mahfud, Choirul. "Ideologi Media Islam Indonesia Dalam Agenda Dakwah: Antara Jurnalisme Profetik Dan Jurnalisme Provokatif." *Jurnal Dakwah* 15, No. 1 (2014): 1–18.
- Muhtadiah, Dian. "Peran Jurnalisme Profetik Menghadapi Hoax." *Jurnal Dakwah Tabligh* 18, No. 2 (22 November 2017): 181–200. <Https://Doi.Org/10.24252/Jdt.V18i2.4701>.

- Munandar, Aris. "Konsep Dakwah Ahmad Hassan Dan Implementasinya Dalam Gerakan Dakwah Persis (Studi Kasus Debat Di Majalah Dan Di Pesantren Persatuan Islam)." *Komunika: Journal Of Communication Science And Islamic Da'wah* 4, No. 2 (2021): 1-14.
- Najib, Muhammad Ainun. "Nu, Soekarno Dan Staat Islam: Wacana Negara Islam Dalam Berita Nahdlatoel Oelama (BNO)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 1 (1 Juli 2017): 163-84. <Https://Doi.Org/10.21274/Ahkam.2017.5.1.163-184>.
- Nasihin. "Islam Dan Kebangsaan: Studi Tentang Politik Islam Masa Pergerakan Nasional Di Indonesia." *Jurnal Rihlah* 2, No. 1 (2014): 11-26.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Ong Hok Ham. "Penyebaran Islam Di Indonesia Dan Konflik Politik." *Kompas*, Mei 1984.
- Pamungkas, Arie Setyaningrum. "Mediatisasi Dakwah, Moralitas Publik Dan Komodifikasi Islam Di Era Neoliberalisme." *Maarif* 13, No. 1 (Juni 2018): 55-75.
- Poeze, Harry A. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia Di Belanda (1600-1950)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Prabaswara, Sandya Sahisnu, Dan Muhammad Wildan. "Kontribusi Suara Muhammadiyah Bagi Pengembangan Masyarakat Islam Di Indonesia (1915-1957)." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 19, No. 2 (2 Januari 2023): 229-42. <Https://Doi.Org/10.15575/Al-Tsaqafa.V19i2.21108>.
- Prabowo, Rechardus Deaz. "Pemikiran Modernisasi Ekonomi Bumiputra Dalam Surat Kabar Boedi Oetomo Dan Soeara Moehammadiyah Di Hindia Belanda (1920-1928)." *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 3, No. 1 (10 Desember 2019): 33-54. <Https://Doi.Org/10.33652/Handep.V3i1.55>.
- Prayogi, Arditya. *Pers Dan Pergerakan*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Prayogi, Arditya, Dan Ardiyan Darutama. "Sikap Politik Surat Kabar Fadjar Asia: Respon Politis Atas Isu Pergerakan Nasional 1927-1930." *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 12, No. 2 (31 Juli 2022): 154. <Https://Doi.Org/10.25273/Ajsp.V12i2.9656>.
- Prianto, Agung Teguh. "Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, No. 1 (22 Juli 2023): 193-210. <Https://Doi.Org/10.55372/Bilhikmahjkpi.V1i1.15>.
- Ramli, Ramli. "Dakwah Dan Jurnalistik Islam (Perspektif Dakwah Islamiyah)." *KOMUNIDA: Media Komunikasi Dan Dakwah* 5, No. 1 (30 Juni 2015): 10-30. <Https://Doi.Org/10.35905/Komunida.V5i1.61>.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Rizkianto, Anggit. "Dakwah Dan Pendidikan Sarekat Islam Sebagai Fase Pembuahan Nilai-Nilai Pancasila." *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 7, No. 1 (3 Juni 2022): 25-36.
- . "Kepemimpinan Karismatik H.O.S. Tjokroaminoto Di Sarekat Islam." *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 2, No. 1 (21 Agustus 2020): 55-80. <Https://Doi.Org/10.55372/Inteleksiajpid.V2i1.71>.
- Romli, Asep Syamsul M. *Jurnalistik Dakwah: Visi Dan Misi Dakwah Bil Qalam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sa'diyah, Halimatus, Dan Muchamad Suradji. "Dinamika Industri Media Islam Di Indonesia Sebagai Gerakan Dakwah." *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 8, No. 1 (9 April 2021): 15-35. <Https://Doi.Org/10.52166/Dareilmi.V8i1.2396>.
- Salmon, Claudine. "Apakah Dari Sudut Linguistik Istilah Bahasa Melayutionghoa Dapat Diterima?" Dalam *Citra Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983.

- Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Sopiaan, Ainur Rofiq. *Tantangan Media Informasi Islam; Antara Profesionalisme Dan Dominasi Zionis*. Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Subandi, A. *Ilmu Dakwah*. Bandung: Yayasan Syahida Bandung, 1994.
- Suhandang, Kustadi. *Manajemen Pers Dakwah: Dari Perencanaan Hingga Pengawasan*. Bandung: Marja, 2007.
- Suwari, Dan Dedy Pradesa. "Rasionalitas Islam Dalam Dakwah: Perspektif Normatif Dan Historis." *INTELEKSIJA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 5, No. 2 (29 Desember 2023): 241–62. [Https://Doi.Org/10.55372/Inteleksiajpid.V5i2.277](https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.V5i2.277).
- Suwirta, Andi. "ZAMAN PERGERAKAN, PERS, DAN NASIONALISME DI INDONESIA :" *Mimbar Pendidikan* 4, No. 1 (1999).
- Tabroni, Roni. "Peran Pers Ormas Islam Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Masa Pra Kemerdekaan: Kajian Atas 'Suara Muhammadiyah.'" *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, No. 2 (12 Juni 2022): 257–66. [Https://Doi.Org/10.15575/jis.V2i2.18497](https://doi.org/10.15575/jis.V2i2.18497).
- Tasmara, Toto. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Tebba, Sudirman. *Jurnalisme Baru*. Ciputat: Kalam Indonesia, 2005.
- Toer, Pramoedya Ananta. *Sang Pemula*. Jakarta: Hasta Mitra, 1985.
- Toni, Hariya. "Dakwah Syarikat Islam Dan Kontribusinya Dalam Masyarakat Indonesia." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 20, No. 2 (30 Desember 2020): 221–38. [Https://Doi.Org/10.15575/Anida.V20i2.10602](https://doi.org/10.15575/anida.V20i2.10602).
- Tripp, Charles. *Islam And The Moral Economy, The Challenge Of Capitalism*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Triyanta, Agus. "Fajar Pers Muslim Bumi Putra Di Masa Hindia Belanda: Wacana Anti Kapitalisme Dalam Majalah Medan Moeslimin (1915-1926)." *PANANGKARAN: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 7, No. 1 (2023): 112–29.
- Usman, Usman. "Negara Dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, No. 1 (20 Juni 2015): 130–39. [Https://Doi.Org/10.24252/Ad.V4i1.1506](https://doi.org/10.24252/ad.V4i1.1506).
- Van Niel, Robert. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Yakin, Syamsul. "Dakwah Politik Dalam Paradigma Simbiotik." *Jurnal Komunikasi Islam* 9, No. 1 (1 Juni 2019): 58–81. [Https://Doi.Org/10.15642/Jki.2019.9.1.58-81](https://doi.org/10.15642/jki.2019.9.1.58-81).
- Zakariya, Najidah, Dan Abu Dardaa Mohamad. "Media Sebagai Wasilah Dakwah." *AL-HIKMAH* 5, No. 5 (2013): 92–99.

